

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah singkat Kampung Badran

Kampung Badran merupakan sebuah pemukiman yang berada di pinggiran kota Yogyakarta. Kampung Badran memiliki berbagai sejarah panjang dari awal pembentukannya. Pada awalnya, Kampung Badran merupakan bekas BONG (pemakaman etnis Tionghoa) yang kemudian dijadikan rumah-rumah warga oleh masyarakat sekitar. Karena bekas BONG, Kampung Badran sering disebut dengan BONG. Bagi masyarakat Tionghoa yang memiliki kekayaan yang lebih, abu leluhur mereka yang berada di makam China Badran kemudian di pindahkan ke makam China Gunung Sempu.

Namun, ada pula yang menyebutkan bahwa Badran merupakan tempat untuk melakukan meditasi atau melakukan tirakat. Maka Badran juga disebut dengan *Bebodro*. Karena pengucapannya yang susah, warga lebih nyaman menyebutnya dengan kata Badran. Kampung Badran memiliki Rukun Warga (RW) sejumlah empat, RW terdiri dari 09, 10, 11, dan 12. RW tersebut yang merupakan bekas dari dari puing-puing pemakaman kemudian dijadikan rumah-rumah.

Setelah menjadi sebuah pemukiman rumah, pada tahun 1970-an terdapat warga bernama Agus Joko Lukito, yang lebih tersohor dengan nama "Gun Jack". Gun Jack mempunyai pekerjaan sebagai salah satu preman pada waktu itu. Selain itu, Gun Jack juga memiliki pengaruh yang

kuat atas kriminalitas, dan disegani oleh TNI serta polisi. Gun Jack terkenal di tempat hiburan malam di kota Yogyakarta, seperti pasar kembang dan nge-*bong*. Meskipun seorang preman, namun Gun Jack memiliki sisi positif. Gun Jack telah membangun masjid sejumlah 18, dan tercatat sebagai anggota BIN (Badan Intelijen Negara) dan memberikan sumbangan kepada masyarakat yang kurang mampu. Gun Jack meninggal pada tahun 2011. Seiring dengan berjalannya waktu, Kampung Badran memiliki masyarakat yang kurang mampu dengan jumlah yang cukup banyak. Sehingga dengan faktor tersebut menjadikan masyarakat Kampung Badran berkegiatan negatif. Kampung Badran terkenal dengan sebutan Kampung Preman.

Hal ini tidak terlepas dari masa lalu Kampung Badran yang memiliki preman, dan kemudian karena di tengah kota Yogyakarta sehingga mengakibatkan tingkat penduduk yang tinggi. Kebiasaan masyarakat Badran di masa lalu yang cukup negatif dari anak jalanan, anak preman, pencuri, pemabuk. Stigma negatif tersebut melekat pada Kampung Badran selama bertahun-tahun. Pada tahun 2011, Kampung Badran mulai berbenah untuk mengubah stigma negatif tersebut. Kampung Badran mulai merintis sebagai Kampung Ramah Anak setelah dicanangkan oleh walikota kota Yogyakarta Hery Zudianto. Meskipun awalnya hanya RW 11 yang menjadi kampung ramah anak, namun dalam perkembangannya RW lain turut menjadikan wilayahnya sebagai kampung ramah anak.

Ketiga hal tersebut merupakan sejarah dari Kampung Badran yang mungkin menjadikan fase kehidupan bagi masyarakat yang tinggal dan lahir di Kampung Badran.

B. Letak Geografis Kampung Badran

Kampung Badran merupakan wilayah yang masuk dalam Kecamatan Jetis dan Kelurahan Bumijo. Lokasi dari Kampung Badran yaitu kurang lebih 2,45 km dibarat laut titik 0 km Kraton Yogyakarta . Pada sisi sebelah utara berbatasan langsung dengan Kampung Pingit dan Kelurahan Bener serta jalan raya arah Godean. Selain itu, pada bagian sebelah barat, Kampung Badran dibatasi dengan Sungai Winongo, Kelurahan Tegalrejo dan Kampung Tompeyan yang berjarak kurang lebih 1,5 km. Sebelah timur dari Kampung Badran dibatasi oleh Tentara Rakyat Mataram serta perbatasan jalan menuju Kelurahan Gowongan.

Pada sisi selatan, Kampung Badran dibatasi jembatan rel yang memisahkan Kampung Badran dengan kelurahan Pringgokusuman. Penjelasan mengenai keterangan diatas dapat dilihat melalui gambar peta wilayah Kampung Badran di bawah ini.

Gambar 3
Peta wilayah Kampung Badran



Sumber: Dokumentasi peneliti

Kampung Badran memiliki empat RW yang terbagi menjadi RW 09, 10, 11, 12. Ke-empat RW tersebut memiliki RT (Rukun tetangga) sebagai berikut:

Tabel 1
Data Penduduk Kampung Badran RW 11 Tahun 2016

No	Rukun Warga (RW)	Rukun Tetangga (RT)	Jumlah KK (Kepala Keluarga)	Jumlah Penduduk
1	RW 09	39, 40, 41, 42	361	1.094
2	RW 10	43,44,45,46	237	731
3	RW 11	47,48,49,50,51	444	1.326
4	RW 12	52,53,54,55,56	268	802
	Total		1.310	3.953

Sumber: Dokumentasi Kelurahan Bumijo

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Kampung Badran memiliki jumlah kepadatan penduduk yang cukup tinggi yang dapat dilihat dari jumlah per-RW dengan jumlah total 3.953 penduduk.

C. Tingkat Pendidikan Kampung Badran RW 11

Pendidikan merupakan sebuah hal yang penting bagi individu agar mampu mendapatkan ilmu yang baik di masa depan. Pendidikan juga mempengaruhi pola pikir dari seorang individu. Kota Yogyakarta yang merupakan kota pelajar, dengan berbagai pelajar dari kota mana saja. Namun meskipun begitu, di dalam sebuah perkampungan, terdapat masyarakat yang memiliki jenjang pendidikan yang berbeda-beda. Hal tersebut termasuk di dalam Kampung Badran RW 11.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Kampung Badran RW 11 Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2016

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	114	116	230
2	Belum tamat SD/ sederajat	64	75	139
3	Tamat SD/ sederajat	120	138	258
4	SLTP/ sederajat	102	91	193
5	SLTA/ sederajat	187	189	376
6	Diploma I/II	0	4	4
7	Akademi/ Diploma III	9	19	28
8	Diploma IV/ Strata I	44	47	91
9	Stratra II	5	2	7
10	Stratra III	0	0	0
	Total	645	681	1326

Sumber: Dokumentasi Kampung Badran RW 11

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kampung Badran RW 11 sebanyak 1326, dengan penduduk yang belum sekolah cukup banyak dengan jumlah 230. Hal tersebut menunjukkan tingkat kelahiran di Kampung Badran RW 11 cukup tinggi. Apabila

diamati dengan seksama, tabel tersebut juga menunjukkan jumlah anak-anak di Kampung Badran RW 11 yang cukup banyak. Dengan anak yang banyak di dalam lingkungan perkotaan, tentu membuat ruang gerak bermain anak-anak juga terbatas.

D. Jenis Mata Pencaharian Kampung Badran RW 11

Kampung Badran memiliki letak geografis yang berada di tengah kota Yogyakarta. Namun meskipun demikian, tidak mempengaruhi jenis mata pencaharian yang ada di dalam Kampung Badran. Dari data di atas, dengan jenjang pendidikan yang berbagai jenis, tentu membuat tingkat perkenomian dari satu keluarga ke keluarga lain berbeda. Jumlah anak yang dimiliki oleh sebuah keluarga juga membuat tingkat kebutuhan dari sebuah keluarga berbeda pula. Dari melihat jenis mata pencaharian, maka dapat lihat pula tingkat perekonomian dari sebuah lingkungan. Mata pencaharian yang berada pada daerah perkotaan kota Yogyakarta, tentu tidak lepas dari kota Yogyakarta yang menjelma menjadi kota budaya, kota pelajar dan salah satu destinasi wisata di Indonesia. Maka, pada penduduk Kampung Badran RW 11, jenis mata pencaharian akan dijelaskan melalui tabel sebagai berikut

Tabel 3
Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan di Kampung Badran RW 11 Tahun 2016

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Belum bekerja / tidak bekerja	124	91	215
2	Mengurus Rumah Tangga	0	218	218
3	Pelajar/ Mahasiswa	130	157	287
4	Pensiunan	10	5	15
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	19	12	31
6	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	1	0	1
7	Kepolisian Republik Indonesia	1	0	1
8	Konstruksi	1	0	1
9	Karyawan Swasta	182	97	279
10	Karyawan Honorer	0	1	1
11	Buruh Harian Lepas	63	27	90
12	Seniman	2	0	2
13	Pendeta	1	0	1
14	Dosen	1	1	2
15	Guru	1	3	4
16	Pengacara	1	0	1
17	Konsultan	0	1	1
18	Dokter	1	1	2
19	Bidan	0	1	1
20	Perawat	1	0	1
21	Wiraswasta	103	62	165
22	Pekerjaan lainnya	3	4	7
	Total	645	681	1326

Sumber: Dokumentasi Kampung Badran RW 11

Dengan jumlah penduduk yang bermata pencaharian berbagai macam, maka Kampung Badran RW 11 dapat dikatakan memiliki tingkat perekonomian yang cukup menengah karena jumlah wiraswasta yang tinggi dan karyawan swasta yang jumlahnya tinggi pula.

E. Tingkat Keagamaan Kampung Badran RW 11

Sebagai warga negara Indonesia, yang memiliki Pancasila sebagai ideologi bangsa tentunya dalam kehidupan bermasyarakat, Pancasila tersebut kemudian diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Pada sila

pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengaplikasiannya adalah dalam kehidupan bermasyarakat tentu memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Pada Kampung Badran RW 11, jumlah keyakinan yang dianut oleh setiap individu memiliki keberbedaan. Berikut adalah data mengenai jumlah penganut keyakinan di Kampung Badran RW 11

Tabel 4
Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kampung Badran RW 11 Tahun 2016

No	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	530	564	1.094
2	Kristen	58	58	116
3	Katholik	57	59	116
		645	681	1.326

Sumber: Dokumentasi Kampung Badran RW 11

Dari tabel tersebut menunjukkan, mayoritas masyarakat di Kampung Badran RW 11 berkeyakinan islam. Namun, meskipun memiliki keyakinan yang cukup tinggi di dalam Kampung Badran, tidak menjadikan masyarakat lain di dalam Kampung Badran yang memiliki agama lain berkecil hati atau merasa dikucilkan. Di dalam Kampung Badran RW 11 sendiri memiliki masjid yang diberi nama Masjid At-Taqwa dan Masjid Al-Huda. Masjid At-Taqwa memiliki daya tampung kurang lebih 200 jamaah dan Masjid Al-Huda memiliki daya tampung 70-90 jamaah. Selain itu, di dalam Kampung Badran juga terdapat gereja Kristen dan Katolik yang dijadikan masyarakat lain dengan agama tersebut biasanya bersembahyang.

F. Tingkat Sosial dan Budaya di Kampung Badran RW 11

Dalam melaksanakan kehidupan dalam sebuah kampung, tentu tidak lepas dari kegiatan sosial yang dilakukan didalam sebuah kampung tersebut. Kegiatan- kegiatan sosial ini menjadikan masyarakat menjadi semakin akrab. Kegiatan sosial yang dilakukan di Kampung Badran RW 11 tidak lepas dari unsur kebudayaan yang ada di kota Yogyakarta.

Kegiatan gotong-royong di dalam Kampung Badran RW 11 mampu menumbuhkan rasa kepedulian antar warga. Meskipun berada di wilayah perkotaan di Yogyakarta, Kampung Badran RW 11 masih dilakukan namun lingkupnya biasanya RT. Pendatang didalam Kampung Badran RW 11 juga memiliki rasa kepedulian untuk mengikuti kegiatan sosial, namun ada juga yang acuh tak acuh karena tingkat kesibukan dari individu yang memungkinkan tidak dapat akrab dengan yang lain. Kegiatan yang masih berjalan hingga sekarang di dalam Kampung Badran RW 11 antara lain:

1. Tradisi *Rewang*, ialah kegiatan gotong royong yang biasa dilakukan oleh masyarakat setempat, didominasi oleh ibu-ibu. Tradisi ini ada ketika seseorang individu mempunyai hajatan, seperti pernikahan atau peringatan kematian, peringatan kelahiran dan kehamilan yang menginjak angka 7 bulan.
2. Kerja Bakti, adalah kegiatan gotong royong pula yang didominasi oleh bapak-bapak. Kegiatan ini dilakukan untuk membersihkan fasilitas-fasilitas di kampung. Misalnya membersihkan parit, got, rumput liar,

sampah dan lain-lain. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan bersih-bersih dan menambah keakraban di tengah rutinitas warga.

3. Paguyuban, adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh bapak-bapak dalam kurun waktu sebulan sekali. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada tingkat RT.
4. Arisan, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh ibu-ibu untuk menambah keakraban antar masyarakat. Dalam kegiatan ini, biasanya dimasukan informasi-informasi yang penting dari tingkat kelurahan, kecamatan maupun tingkat provinsi.

G. Profil Informan

1. Joko Sularno

Joko Sularno merupakan *key* informan dalam penelitian ini. Joko Sularno adalah mantan ketua RW pada dua periode, yaitu dari tahun 2008-2015. Joko tinggal di Badran RW 11 sejak tahun 1993. Pada masa periode Joko itulah, dicanangkannya program kampung ramah anak. Pada masa itu pula, tokoh masyarakat yang menyadari bahwa perlunya perlindungan anak di dalam lingkungannya adalah Joko.

2. Anastasia Partini

Anastasia Partini merupakan informan selanjutnya yang di pilih Joko Sularno. Anastasia Partini adalah ketua RW 11 sekarang. Namun, saat masa periode Joko sebagai ketua RW, Anastasia Partini dirasa Joko salah satu yang berpengaruh dalam proses pendampingan menjadi kampung ramah anak.

3. Sariman

Sariman merupakan informan yang dilanjutkan dari Anastasia Partini. Sariman juga menjadi mantan ketua RW setelah Joko Sularno. Menurut Anastasia Partini, Sariman memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan program kampung ramah anak.

4. Wahyu

Wahyu merupakan informan tambahan dari Sariman. Menurut Sariman, Wahyu memahami betul mengenai salah satu program yang ada dalam kampung Badran sebagai salah satu penunjang adanya kampung ramah anak.

5. Hendro Basuki

Hendro Basuki merupakan Kepala Seksi Bidang Pengarusutamaan Anak. Hendro Basuki masuk dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. Dinas tersebut merupakan dinas yang membawahi program kampung ramah anak.

6. I Sutikno

I Sutikno merupakan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia cabang kota Yogyakarta. Adanya kampung ramah anak adalah sebagai wujud perlindungan anak. Penulis merasa bahwa memerlukan informan dari KPAI karena penelitian berhubungan dengan perlindungan anak.

BAB III

PEMBAHASAN

Dalam pembahasan mengenai perubahan tatanan sosial dari kampung preman menjadi kampung ramah anak, penulis akan menjabarkan kampanye yang telah dilakukan oleh para tokoh masyarakat di Kampung Badran RW 11. Kampanye merupakan serangkaian kegiatan komunikasi yang mampu mempengaruhi khalayak. Dalam kegiatan mempengaruhi tersebut dibutuhkan individu-individu yang memiliki pengaruh dalam lingkungan. Karena kampanye dilakukan dalam tatanan sosial sebuah kampung, pemilihan tokoh masyarakat menjadi sesuatu yang cocok.

Kampanye yang akan dibahas meliputi dari bagian perencanaan kampanye, pelaksanaan kampanye hingga tahap evaluasi kampanye. Perencanaan kampanye yang baik akan menjadikan kampanye yang akan dilakukan sesuai dengan tujuan, pelaksanaan kampanye dilakukan dengan mengukur kondisi di lapangan sesuai dengan perencanaan atau tidak, serta evaluasi kampanye untuk mengetahui sebuah kampanye dapat dikatakan berhasil atau tidak. Pembahasan kampanye akan dipadukan dengan indikator-indikator kota layak anak. Indikator kota layak anak didapatkan dari UU Perda Kota Layak Anak No.1 Tahun 2016 yang meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus.

Dari kedua hal tersebut dijadikan satu dalam unit analisis penelitian “Kampanye Program Kampung Ramah Anak dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Yogyakarta”. Tahapan dalam kampanye merujuk pada tahapan-tahapan yang dijabarkan oleh Antar Venus (2004:134-219). Pembahasan mengenai hasil penelitian sebagai berikut:

A. Perencanaan Kampanye Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Yogyakarta

Perencanaan kampanye merupakan komponen penting dari kampanye. Dalam sebuah perencanaan kampanye, terdapat tujuan yang akan dicapai secara bersama. Pencapaian tujuan yang akan dicapai serta sasaran yang akan dituju merupakan pembahasan pokok dalam sebuah perencanaan kampanye. Melalui Assifi dan Nimmo (Cangara:2016:245), penyusunan perencanaan kampanye melewati enam tahapan, yang telah dijabarkan di atas. Keenam tahapan tersebut disatukan dalam sebuah indikator kota layak anak yang tercantum pada UU Perda No.1 Tahun 2016 tentang Kota layak Anak. Terkait dengan perencanaan kampanye menurut Assifi dan Nimmo, yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis Masalah

Tahapan pertama yang dilakukan dalam perencanaan kampanye ialah melakukan analisis masalah. Analisis masalah diperlukan agar kampanye yang direncanakan akan sesuai dengan kondisi dari lapangan dan permasalahan yang sedang dihadapi.

Berdasarkan pengamatan penulis, tokoh masyarakat mampu memutuskan untuk menggerakkan kampanye kampung ramah anak di bagian yang sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh Kampung Badran RW 11 yaitu perlindungan anak dan ruang gerak. Hal tersebut diperkuat dengan ketiga pernyataan informan yang menyebutkan kekerasan anak yang terjadi di kampungnya.

2. Menganalisis Khalayak

Langkah selanjutnya yang dilakukan saat perencanaan kampanye ialah analisis khalayak. Berdasarkan pengamatan, khalayak yang akan diberi kampanye merupakan masyarakat Kampung Badran RW 11, terutama para orangtua. Karena pemenuhan hak anak akan berhubungan dengan orang tua yang setiap saat berada didekat anak. “Kita tidak bosan untuk memberitahu masyarakat dan orangtua, tentang pentingnya hak anak tersebut. Tetap kami pantau.”(Sariman, wawancara 03

November 2018 pukul 20.00 WIB). Hal senada juga disampaikan oleh Hendro Basuki, sebagai berikut:

“Orang tua ya diberi pemahaman dulu. Kalo orang tua sudah paham akan hak anak, anak juga kemudian diberikan ruang. Maka dari itu, orang tua harus disadarkan dulu.”(Hendro Basuki, wawancara 12 November 2018 pukul 15.00 WIB).

Khalayak yang diberi kampanye merupakan warga yang tinggal di Kampung Badran RW 11.

3. Merumuskan Tujuan

Langkah berikutnya adalah perumusan tujuan. Tujuan dari pengadaan kampanye program kampung ramah anak adalah untuk memenuhi hak-hak anak yang telah dituangkan dalam perundang-undangan. Pada Kampung Badran RW 11, Joko dan rekan-rekannya telah menyadari betul bahwa penetapan tujuan kampanye program kampung ramah anak, mengupayakan terwujudnya hak anak. Meskipun penetapan tujuan belum secara ideal sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Terkait dengan tujuan kampung ramah anak Badran RW 11, Joko memaparkan sebagai berikut:

“Kampung Badran RW 11 sebagai perintisan kampung ramah anak masih bertuliskan “MENUJU” Kampung ramah anak. Tulisan “MENUJU” pada kampung ramah anak diartikan sebagai masyarakat yang ada di Kampung Badran RW11 mengupayakan menjadi kampung ramah anak. Kemudian, setelah berganti RW sampai sekarang, tokoh masyarakat selaku pelaku kampanye terus mengupayakan agar menjadi ideal sesuai dari dari pemerintah.”(Joko Sularno, wawancara 03 November 2018 pukul 16.00 WIB).

Hal senada juga disampaikan oleh Sariman, mengenai kampung ramah anak Badran RW 11 yang ideal sesuai dengan kota layak anak:

“Sebenarnya kalo kita menuju ke ideal, masih jauh. Karena dari awal kita menjadi sebuah pionir, kita baru menuju kampung ramah anak. Dari awal dibentuk, hingga masa pimpinan saya, kita berusaha untuk menjadi lebih ideal.”(Sariman, wawancara 03 November 2018 pukul 20.00 WIB).

Pembahasan mengenai perencanaan tujuan kampanye, disampaikan pula oleh Hendro. Ia menyebutkan bahwa adanya kampung ramah anak merupakan inisiatif dari tokoh masyarakat yang ada di kampung untuk memperjuangkan hak anak di dalam lingkungan. Tentunya tujuan tersebut tergantung dari setiap tokoh masyarakat bersama warganya agar dalam memperjuangkan hak anak dapat berjalan dan berkembang sesuai rencana.

Namun, apabila membahas mengenai kota layak anak, adanya kampung ramah anak tentu masih dalam kondisi yang belum maksimal ke arah kota layak anak. “Meskipun dideklarasikan menjadi kampung ramah anak, terwujudnya kampung ramah anak yang sesuai standar kota layak anak tetap tergantung pada masyarakatnya.”(Hendro Basuki, wawancara 12 November 2018 pukul 15.00 WIB).

Hal serupa di katakan oleh I Sutikno selaku ketua KPAI cabang kota Yogyakarta, bahwa pengamatannya setelah rintisan-rintisan kampung ramah anak ada yang masih berjalan dan belum berjalan dengan baik. Karena dalam ranah kampung, tidak bisa seorang tokoh masyarakat bekerja secara individu untuk mewujudkan tujuan bersama.

“Tokoh masyarakat harus bekerja sama dengan lapisan masyarakat untuk mengerti dan memahami yang tengah dikerjakan oleh tokoh masyarakat. Maka dari itu, informasi yang lengkap dan tujuan yang ingin dicapai harus diberikan dari tokoh masyarakat dan segenap masyarakat. Ketidakberhasilan kampung ramah anak karena tiap rapat

berganti orang, jadi mereka juga tidak mengerti apa yang sebelumnya dibahas.”(I Sutikno, wawancara 12 November 2018 pukul 14.00 WIB).

Apabila melihat dari keberhasilan atau kemajuan setiap indikator dalam kota layak anak, tentu masih terdapat kekurangan dari segi ideal. Pernyataan mengenai keidealan sebuah kampung ramah anak dari Hendro:

“Ideal menurut standar dari pemerintah belum tentu diaplikasikan dengan sesuai di sebuah kampung ramah anak. Karena bukan berasal dari penunjukkan, target dan tujuan kampanye tidak diketahui oleh DPMPPA.”(Hendro Basuki, wawancara 12 November 2018 pukul 15.00 WIB).

Dari pemaparan informan diatas, penulis dapat mengartikan bahwa tujuan dari kampung ramah anak Badran RW 11 belum menjadi ideal dan tidak dapat berlangsung lama apabila tidak ada kesadaran dari tokoh masyarakat dan masyarakat yang ada untuk selalu mengembangkan program yang ada di dalam kampungnya.

Penulisan “MENUJU” pada gapura RW 11 telah didokumentasikan penulis

Gambar 4
Gapura Kampung Badran RW 11



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Beberapa kasus pernah terjadi ketika pergantian kepengurusan RW, seseorang yang telah diberikan amanah menjadi ketua RW yang baru tidak mengetahui adanya program kampung ramah anak di dalam kampungnya. Hal tersebut mengakibatkan tujuan dan program yang awalnya bisa diteruskan dan dikembangkan oleh tokoh masyarakat dan ketua RW selanjutnya tidak dapat berjalan, atau bahkan mengalami kemunduran dari sebuah program yang ada di kampung ramah anak.

Berdasarkan pada pengamatan penulis, kampung Badran RW 11, saat masa kepemimpinan Joko Sularno tujuan dari adanya kampung ramah anak juga menjadikan Kampung Badran RW 11 menjadi sebuah kampung untuk wisata edukatif. Dengan dibuatnya kolam renang dan gubuk disekitarnya diharapkan mampu mendatangkan orang diluar kampung untuk berkunjung, dan juga menjadikan salah satu tempat bermain yang baik untuk anak di Kampung Badran RW 11, namun setelah berpindah kepengurusan RW kolam renang tersebut tidak lagi difungsikan dan terbengkalai..

Gambar 5
Kolam Renang Kampung Badran RW 11



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Dari dokumentasi di atas dapat di lihat bahwa tidak sesuai dengan tujuan Joko Sularno pada awalnya. Namun, Sariman dan Anastasia Partini menggeluti tujuan yang lain di luar tujuan menjadikan Kampung Badran RW 11 menjadi wisata edukatif. Kampung ramah anak di Kampung Badran RW 11 memusatkan pemenuhan anak kepada perlindungan kepada anak dan pemberian ruang gerak pada anak.

Penetapan tujuan memfokuskan pemenuhan hak anak pada perlindungan dan ruang gerak untuk anak karena sebelumnya, terjadi beberapa kekerasan pada anak yang dilakukan oleh orang tua secara sadar. Hal tersebut diamati oleh penulis ketika melakukan wawancara dengan informan, informan secara terus menerus mengulangi perkataan kekerasan pada anak, cara

menanggulangi kekerasan, dan lain sebagainya. Pengulangan kalimat tersebut tidak hanya pada satu informan, namun semua informan.

Dalam perencanaan kampanye program kampung ramah anak tidak memerlukan strategi yang khusus, karena tokoh masyarakat yakin bahwa dalam menggalakan kampanye ini, mereka dibantu oleh segenap lapisan masyarakat sesuai dengan porsinya masing-masing. Anastasia Partini menyampaikan sebagai berikut:

“Kita melakukan FGD (*Forum Grup Discussion*) dulu mbak. Dengan itu kita tahu, langkah apa yang harus kita ambil dan fokusnya kemana. Jadinya lebih mudah.”(Anastasia Partini, wawancara 03 November 2018 pukul 19.00 WIB).

Pernyataan senada disampaikan oleh Sariman, sebagai berikut:

“Mmm....kita tu gak punya strategi mbak. Ya planning ada, tapi kalo *action* kita dadakan. Jadi langsung saja, pas ada perkumpulan kita beri pemahaman hak anak. Gitu secara terus menerus.”(Sariman, wawancara 03 November 2018 pukul 20.00 WIB).

Dari paparan diatas, Hendro Basuki menambahkan mengenai strategi perencanaan kampanye dalam sebuah kampung ramah anak, sebagai berikut:

“Kami selalu merayakan hari anak. Kita juga selalu bikin lomba-lomba untuk anak. Misalnya poster dan video. Ya biar, kampung sebelah yang belum menjadi KRA (kampung ramah anak) pingin tahu, itu ada apa sih disebelah. Dan harapannya jadi kepingin.”(Hendro Basuki, wawancara 12 November 2018 pukul 15.00 WIB).

Menurut data yang diperoleh penulis di Kelurahan Bumijo menyebutkan bahwa Kampung Badran sekarang memiliki beberapa kampung ramah anak. Dari yang awalnya hanya RW 11, sekarang merambah ke RW 10, 09, 12. Strategi lain dikemukakan oleh Sutikno, dalam merencanakan sebuah kampanye yang ranahnya untuk anak, sebagai berikut:

“Kan yang dituju anak-anak, jadi yang harus didengarkan anak-anaknya bukan orang tuanya. Jangan cuma orang tua nya saja. Terus, anak juga harus dilibatkan dalam Musrenbang. Kan anak itu senang kalo dianggap ada.”(I Sutikno, wawancara 12 November 2018 pukul 14.00 WIB).

Dari data diatas dapat diartikan bahwa sebaiknya dalam perencanaan strategi kampanye, tokoh masyarakat didalam Kampung Badran RW 11 mendengarkan keluh kesah dari anak. Namun, upaya yang dilakukan tokoh masyarakat dalam strategi tersebut juga cukup baik karena menyadari tentang khalayak dan tujuan yang ingin dituju, sehingga setidaknya hal tersebut tetap dijalankan meskipun tidak menggunakan strategi yang khusus.

4. Memilih Media

Penggunaan media dalam perencanaan kampanye diperhatikan oleh tokoh masyarakat. Media dalam perencanaan kampanye yang dikaitkan dengan tujuan kampanye mampu memberikan efek dalam kampanye (Venus: 2004: 87). Tokoh masyarakat merencanakan untuk melakukan pemasangan papan-papan yang berkaitan dengan anak. Dengan dana subsidi yang diberikan oleh pemerintah, mereka akan membuat papan nama

pahlawan, dan papan hak-hak anak yang akan dipasang diberbagai titik. Dan media yang akan digunakan selanjutnya adalah masuk melalui kelompok masyarakat yang ada di Kampung Badran RW 11.

Ketika masuk kedalam kelompok masyarakat, tokoh masyarakat bekerjasama dengan masyarakat yang menjadi pusat di setiap kelompok masyarakat untuk membantu menyebarkan pesan kampanye.

Penggunaan media yang direncanakan oleh tokoh masyarakat di Kampung Badran RW 11 juga senada dengan yang disampaikan oleh I Sutikno.

“Media yang sangat baik dalam sebuah kampung adalah poster dan madding yang kemudian di tempel di tempat *space* kosong seperti di Bale ronda, PKK, Posyandu, dan tempat anak berkegiatan. Maka, masyarakat akan lebih mudah dalam mengingat dan menyerap pesan yang ada di dalam media tersebut.”(I Sutikno, wawancara 12 November 2018 pukul 14.00 WIB).

Dalam pernyataan Hendro, media yang direncanakan lebih baik secara langsung dengan pesan-pesan yang baik pula. Selain itu, dengan menggunakan forum anak. “FAKTA (Forum Anak Kota Yogyakarta) jadi salah satu media untuk mengkampanyekan kampung ramah anak.”(Hendro Basuki, wawancara 12 November 2018 pukul 15.00 WIB).

Dari paparan informan, maka dapat diartikan bahwa media yang digunakan dalam perencanaan kampanye yang dilakukan oleh

tokoh masyarakat telah sesuai dengan apa yang dibutuhkan didalam sebuah kampung.

5. Mengembangkan Pesan

Dalam perencanaan kampanye juga membahas pemberian pesan. Tokoh masyarakat memilih bahasa yang sesuai dan sederhana. Perencanaan penyampaian pesan telah diperhatikan agar pesan yang disampai sesuai dengan tujuan yang diharapkan. “Bahasanya sederhana. Kan dikampung tingkat pendidikannya berbeda di masyarakat.”(Joko Sularno, wawancara 03 November 2018 pukul 16.00 WIB).

Menurut Venus (2004:72) isi pesan kampanye paling tidak melibatkan visualisasi dari dampak positif dan respons yang dapat diterima khalayak sasaran. Karena merupakan ranah di sebuah kampung, pemberian pesan harus dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dari analisis penulis, pemberian pesan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat telah sesuai dengan kondisi yang berada di lingkungan.

Menurut Hendro, pemberian pesan yang baik adalah jelas dan lengkap. “Tidak semua orang pintar, dan tidak semua orang bodoh. Jadi yang lugas, sederhana tapi pas.”(Hendro Basuki, wawancara 12 November 2018 pukul 15.00 WIB).

Dari hasil pengamatan penulis informasi yang diberikan merupakan sebuah struktur maka benar-benar sesuai dengan

susunannya. Informasi harus lengkap. Dapat dipahami pula karena dengan latar belakang yang berbeda di dalam sebuah masyarakat, menjadikan pemberian pesan harus disusun dengan sederhana.

Sesuai dengan tahapan perencanaan kampanye, tahapan tersebut masuk ke dalam beberapa aspek di indikator kota layak anak menurut UU Perda No.1 Tahun 2016 mengenai Kota Layak Anak, sebagai berikut:

a) Hak Sipil dan Kebebasan

Program kampung ramah anak merupakan program yang mengutamakan hak-hak anak di dalamnya. Kampung ramah anak dibentuk sebagai salah satu penunjang dari adanya kota layak anak. Kampung ramah anak yang dibentuk berbasis Rukun Warga(RW), maka program dari setiap kampung ramah anak bervariasi tergantung dari masyarakat dalam melakukan inovasi.

Perencanaan kampanye dalam mengatasi hak sipil dan kebebasan telah direncanakan oleh tokoh masyarakat.

Hak sipil dan kebebasan memiliki pengertian yang besar dan luas, namun dapat diartikan menjadi seorang anak mampu mengemukakan keinginan secara bebas. Pengertian tersebut muncul karena dalam hak sipil dan kebebasan terdapat hak untuk tinggal dan mengemukakan pendapat serta keinginan

secara leluasa tanpa adanya rasa takut dan tekanan dari berbagai pihak.

Dalam perencanaan kampanye, tokoh masyarakat yang melakukan kampanye untuk memenuhi hak-hak anak telah mengakui bahwa ada perencanaan agar anak dengan bebas mengemukakan keinginan. Setelah melakukan penelitian, penulis mendapatkan informasi mengenai perencanaan kampanye dalam upaya memberikan hak anak untuk mengemukakan pendapat. Penuturan dari Joko Sularno mengenai penjaminan hak anak dalam mengemukakan pendapat:

“Waktu Agustus itu saya membentuk forum ramah anak. Waktu itu pemilihan namanya di pilih sendiri oleh mereka. Mereka memilih VOC. Pemilihan kata bagi saya itu sangat unik dan mudah di ingat. Saya sebenarnya cocok dengan nama itu. Namun 2012 dari Kementrian PDPA, mereka mengkritik nama itu karena konotasinya dengan Belanda. Meskipun bersikukuh dengan nama itu, tapi masukan yang diberikan ya bagus. Jadi saya diskusikan lagi sama anak-anaknya untuk penggantian nama.” (Joko Sularno, 03 November 2018 pukul 16.00 WIB).

VOC merupakan kepanjangan dari *Village of Children*. Namun, VOC kemudian kerap dihubungkan dengan masa penjajahan yang mengakibatkan VOC harus berganti nama menjadi PATRIOT. Dengan adanya PATRIOT, anak-anak mampu menjadikan PATRIOT

sebagai wadah dan sarana untuk meningkatkan sosialisasi dengan teman sebaya dan membuat kegiatan-kegiatan positif. Kebebasan anak melalui forum anak kampung menjadi sebuah terobosan untuk Kampung Badran RW 11 dalam memberikan wadah bagi anak. Hal tersebut dilanjutkan dengan pernyataan Sariman:

“Ya kalo dibilang sudah bebas ya anak memang sudah bebas mbak, karena sekarang udah ada wadah yang dimiliki mereka untuk menyalurkan kegiatannya. Melalui forum anak kampung tersebut.”(Sariman, 03 November 2018 pukul 20.00 WIB).

Dalam pembentukan wadah untuk mengemukakan pendapat, menurut informan sudah sesuai dengan tujuan dari perencanaan kampanye dalam hal pemberian wadah hak sipil yang dilakukan. “Iya sesuai tujuan mbak, kan melalui PATRIOT tersebut.”(Joko Sularno, wawancara 03 November 2018 pukul 16.00 WIB).

Namun menurut salah satu informan Anastasia Partini, pembentukan wadah untuk mengemukakan pendapat belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan perencanaan kampanye. “Ya belum 100% mbak, soalnya ini kan hal yang baru bagi mereka untuk mengemukakan pendapatnya di muka umum, jadi perlu adaptasi.”(Anastasia Partini, wawancara 03 November 2018 pukul 19.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Joko, Anastasia Partini dan Sariman selaku tokoh masyarakat di Kampung Badran RW 11 dapat diartikan bahwa pembentukan wadah forum anak kampung tersebut menjadi salah satu tujuan perencanaan kampanye pada indikator hak sipil dan kebebasan. Karena hak sipil dan kebebasan nantinya akan berhubungan erat dengan tempat tinggal dan lingkungan anak. Hal tersebut senada dikatakan oleh Ketua KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) cabang Kota Yogyakarta, I Sutikno:

“Adanya forum anak mampu menjadi sebuah wadah untuk menyalurkan keinginan dan kebebasan anak. Di kota Yogyakarta, kebebasan anak menurutnya telah cukup tertampung oleh adanya forum anak kampung. Forum anak kampung harapannya mampu merambah dari RW menjadi kelurahan, kecamatan.” (I Sutikno, wawancara 12 November 2018 pukul 14.00 WIB).

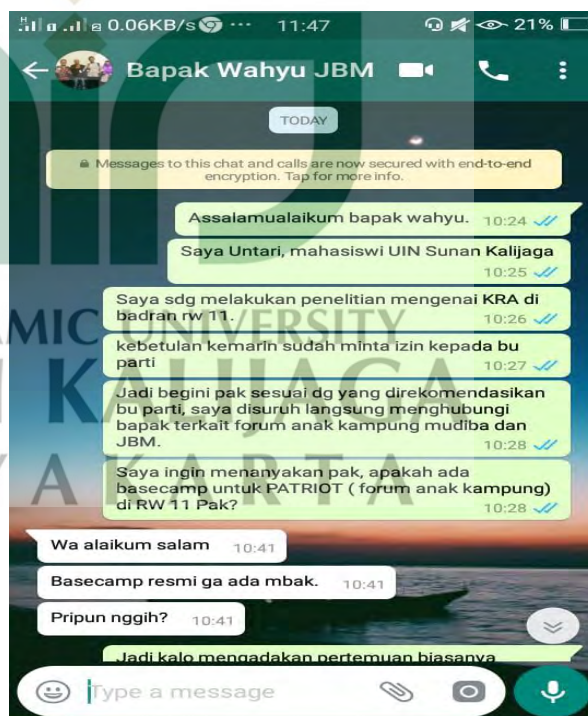
Selain itu, pernyataan mengenai pembentukan wadah untuk anak, disampaikan pula oleh Hendro Basuki selaku Kepala Seksi Pengarusutamaan Hak Anak di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Yogyakarta;

“Adanya FAKTA (Forum Anak Kota) dan Forum-forum anak lainnya itu membuat wadah yang bagus untuk anak. Ya lewat forum anak kampung itu juga, anak wadah yang cocok. Namun belum semua sesuai tujuan, kita harus menggarap dua-duanya. Ada anak yang dapat berbicara, ada anak yang tidak dapat berbicara. Hal tersebut harus kita garap agar

tidak terjadi perbedaan diantara anak. Orang tua juga harus digarap agar tidak menekan anak.”(Hendro Basuki, wawancara 12 November 2018 pukul 15.00 WIB).

Dari pengamatan yang dilakukan oleh penulis, perencanaan kampanye dalam indikator hak sipil dan kebebasan hanya sampai pada pembentukan forum anak kampung. Hal tersebut diperkuat dengan bukti percakapan yang dilakukan peneliti dengan Wahyu salah satu pengurus yang mengetahui mengenai forum anak kampung yang berada di Kampung Badran RW 11.

Gambar 6
Percakapan Pengurus Forum Anak Kampung Badran



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Pada cuplikan percakapan diatas, penulis mengamati bahwa dalam perencanaan kampanye untuk

indikator hak sipil dan kebebasan hanya pemberian wadah untuk anak. Untuk selanjutnya, mengenai program yang ada didalam wadah tersebut menjadi inovasi dari anak-anak di Kampung Badran RW 11, termasuk juga dalam bangunan yang dijadikan sebagai *basecamp* untuk forum anak kampung yang juga belum ada.

Berdasarkan informasi yang telah didapatkan, penulis menganalisis bahwa perencanaan kampanye kampung ramah anak di Kampung Badran RW 11 pada indikator hak sipil dan kebebasan telah mampu menyediakan ruang untuk anak agar dapat melakukan kegiatan yang positif, namun belum sampai pada pemberian fasilitas seperti *basecamp* dan lain sebagainya. Pada pernyataan informan di atas, bahwa pemberian wadah untuk anak belum tuntas untuk menyinggung pada kebebasan anak, karena beberapa hal melalui tahapan adaptasi terlebih dahulu pada anak untuk mengenalkan sebuah program baru di dalam lingkungannya.

b) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Kampung ramah anak merupakan program yang selalu melibatkan anak di dalam setiap kegiatan, maka dari itu perencanaan kampanye dalam indikator lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif juga telah dibahas oleh

tokoh masyarakat. Pada dasarnya seorang anak akan membutuhkan pengawasan dari lingkungan keluarga, untuk itu keluarga sebagai tempat pertama anak belajar harus diperhatikan dan cara pengasuhan yang baik untuk anak agar anak mampu mengembangkan kemampuan dan bakatnya dalam ranah yang lebih positif.

Indikator lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif merupakan indikator kota layak anak yang berhubungan dengan tanggung jawab orang tua dan kesejahteraan yang dibutuhkan oleh seorang anak. Kesejahteraan dapat diartikan dalam penjaminan sosial bagi seorang anak dalam berbagai hal. Dengan mendapatkan penjaminan dari berbagai macam hal yang dibutuhkan oleh anak, diharapkan anak mendapatkan kesejahteraan baik dari lingkungan keluarga maupun sosialnya. Penjaminan sosial dipaparkan oleh Joko sebagai berikut:

“Kita hanya dapat membantu dalam pendampingan pengurusan program-program pemerintah yang sesuai. Misalnya kita bantu dalam pengurusan KMS (Kartu Menuju Sehat) dan sebagainya.”(Joko Sularno, wawancara 03 November 2018 pukul 16.00 WIB).

Menurut Hendro, mengenai penjaminan sosial dalam kampung ramah anak di jelaskan sebagai berikut:

“Kampung ramah anak kan lingkaran besar, jadi semua masuk. Maka dari itu kita kerjasama dengan dinas terkait. Kita tidak bisa berjalan sendiri untuk menyikapi bidang-bidang yang lain. Maka dari itu

kita melakukan kerjasama.”(Hendro Basuki, wawancara 12 November 2018 pukul 15.00 WIB).

Dalam kampung ramah anak, kampanye yang dilakukan oleh (DPPPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama untuk menangani hal-hal terkait dari penjaminan sosial, pendidikan dan sebagainya. Pernyataan berbeda muncul dari I Sutikno yang menanggapi perencanaan kampanye dalam upaya penjaminan sosial di kampung ramah anak sebagai berikut:

“Jika menggunakan kacamata Komisi Perlindungan Anak Indonesia, maka penjaminan sosial harusnya mengandung unsur-unsur hak anak. Unsur hak anak tersebut harus di selenggarakan. Ada empat hak anak yang kemudian dikembangkan oleh KPAI menjadi 31. Hak tersebut antara lain hak hidup, hak tumbuh kembang, hak berpartisipasi dan hak berlingung.”(I Sutikno, wawancara 12 November 2018 pukul 14.00 WIB).

Berdasarkan dari wawancara di atas, dapat diartikan bahwa penjaminan sosial yang diberikan baik melalui kacamata KPAI maupun kacamata tokoh masyarakat, hal tersebut tidak bisa lepas dari peran orang tua dalam mengawasi dan memberikan kebutuhan yang cocok untuk anak. Meskipun untuk kebutuhan dan kesejahteraan anak, lingkungan keluarga dapat memberikan keputusan dan sikap yang harus dilakukan. Penulis mengamati, bahwa kesadaran pemerintah untuk bekerjasama dengan dinas-dinas terkait

cukup membantu dari kinerja DPPPA untuk menangani kampung ramah anak.

Kemudian mengenai pengasuhan alternatif yang merupakan pengasuhan yang harus dilakukan untuk anak meskipun bukan dari keluarga kandung. Pengasuhan alternatif digunakan agar seorang anak tidak merasa kehilangan asuhan dari sosok orang tua, meskipun yang mengasuh bukan orang tua kandung. Beberapa kasus seperti terjadinya perceraian yang kemudian menelantarkan anak sebagai korban, membutuhkan pengasuhan dari orang lain selain orang tuanya yang mampu memberikan pengasuhan yang baik agar anak tidak merasa kekurangan kasih sayang dan pendidikan dari orang tua. Pola pengasuhan alternatif harus diperhatikan dengan baik karena dengan pola pola asuh yang berbeda akan menimbulkan kerancuan dan membuat anak bingung. Pola

pengasuhan alternatif dipaparkan oleh Sariman sebagai berikut:

“Perlu dipahami bersama bahwa tugas dari pengasuhan bukan hanya menjadi tugas seorang ibu namun juga seorang bapak dan tidak hanya keluarga kandung. Maka dari itu, pola pengasuhan menjadi tugas yang penting bagi kita. Demi terpenuhinya hak anak.”(Sariman, wawancara 03 November 2018 pukul 20.30 WIB).

Hal senada dipaparkan oleh Hendro Basuki, dalam penanganan pola pengasuhan alternatif:

“Ya yang jelas orang tua itu harus diberi pemahaman mengenai hak-hak anak. Dengan itu, mereka akan tau juga cara pengasuhan yang baik untuk anak itu gimana. Gak cuma orang tuanya kandung, orang tua lain juga akan simpatik dengan hal-hal tersebut.”(Hendro Basuki, wawancara 12 November 2018 pukul 15.00 WIB).

Melalui penjelasan dari informan, dapat dikatakan dalam pengasuhan alternatif, tokoh masyarakat di Kampung Badran RW 11 telah sadar dengan pentingnya menaruh perhatian pada anak, meskipun bukan dengan anak kandungnya sendiri. Dari pengamatan penulis, tokoh masyarakat menanamkan kesadaran masyarakat sebagai orang dewasa dan orang tua pada hal-hal terkait dengan pola pengasuhan. Strategi yang dilakukan dalam perencanaan dibidang lingkungan keluarga dan pola pengasuhan alternatif dengan pemberian pesan melalui kelompok perkumpulan masyarakat.

Dalam analisis penulis, perencanaan kampanye dalam indikator lingkungan keluarga dan pola pengasuhan alternatif yang telah dilakukan oleh tokoh masyarakat Kampung Badran RW 11 belum secara optimal dilakukan karena perhatian masih terpusat pada hal yang lain, selain dari lingkungan keluarga. Meskipun telah mendapatkan bantuan dari dinas-dinas terkait, namun tokoh masyarakat belum membuat program sendiri untuk menangani masalah

lingkungan keluarga yang dapat diartikan dalam penjaminan sosial bagi anak.

c) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Anak Berkebutuhan Khusus

Dalam pengembangan kota layak anak, program kampung ramah anak di setiap RW dalam sebuah kampung memiliki konsentrasi tersendiri. Program kampung ramah anak di Kampung Badran RW 11 menjatuhkan konsentrasinya pada lingkungan anak. Lingkungan yang menjadi tempat tinggal anak, termasuk pokok utama pembahasan mengenai kampung ramah anak dengan memperhatikan dan menggunakan hak-hak anak dalam setiap kegiatannya. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Joko, memaparkan sebagai berikut:

“Pada tahun 2009, Kampung Badran RW 11 bersamaan dengan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari PT Sarihusada mengadakan program rumah srikandi. Terdapat tiga pilar yang ada dalam rumah srikandi milik Sari Husada, salah satunya dengan dibentuknya Posyandu. Posyandu menjadi sebuah sarana bagi anak dari segi pemenuhan gizi.”(Joko Sularno, wawancara 03 November 2018 pukul 16.00 WIB).

CSR Sari Husada merupakan mitra dalam pemenuhan kesehatan dasar di Kampung Badran RW 11 dapat terbantu. Hal tersebut diungkapkan oleh Anastasia Partini, “Kita mencoba memberikan wadah sesuai dengan

usia anak”(Anastasia Partini, wawancara 03 November 2018 pukul 19.00 WIB).

Dari hasil pengamatan yang dilakukan penulis dalam Kampung Badran RW 11 kesehatan dasar yang diperhatikan hanya dengan pembentukan posyandu yang telah terbentuk sebelum terbentuknya Kampung Badran RW 11 sebagai kampung ramah anak.

Selain adanya posyandu sebagai kesehatan dasar yang tersedia dalam Kampung Badran RW 11, pembahasan lain terarah pada kesejahteraan anak juga dituangkan dengan memberikan ruang gerak bagi anak. Karena letak geografis dari Kampung Badran RW 11 yang berdekatan langsung dengan jalanan raya dan bantaran sungai, ruang gerak bermain hanya seadanya.

Lokasi yang tidak terlalu luas karena sebagian telah digunakan untuk membangun jalan menjadi bagian perencanaan dari kampanye. Meskipun dengan ruang gerak yang minim, namun adanya ruang gerak yang dimanfaatkan mampu membuat anak-anak bersosialisasi dengan sebayanya. “Anak harus disiapkan ruang publik. Kan motif dari anak itu belajar sambil bermain.”(I Sutikno, wawancara 12 November 2018 pukul 14.00 WIB).

Kesejahteraan anak yang diperhatikan juga termasuk dari kesejahteraan anak berkebutuhan khusus.

“Dalam Kampung Badran RW 11, tidak ada anak berkebutuhan khusus, namun memang terdapat beberapa keluarga yang kurang memperhatikan gaya hidup, yang berimbas pada perkembangan anak. “(Joko Sularno, wawancara 03 November 2018 pukul 16.00 WIB).

Menurut Hendro, dalam melakukan perencanaan kesejahteraan lingkungan anak, sesuai yang telah dijelaskan pada pernyataan sebelumnya bahwa, Hendro bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Anak tidak berjalan sendiri, melainkan bekerjasama dengan dinas-dinas terkait. Hal itu juga termasuk dalam kesejahteraan anak berkebutuhan khusus.

“Bagi kami, seorang anak yang berkebutuhan khusus dan anak lainnya itu sama. Tidak ada perbedaan diantaranya. Mereka adalah anak yang harus dijamin hak-haknya. Termasuk juga dari kesejahteraannya”(Hendro Basuki, wawancara 12 November 2018 pukul 15.00 WIB).

I. Sutikno menambahkan melalui pernyataannya mengenai penanganan kesejahteraan anak berkebutuhan khusus dan kesehatan dasar sebagai berikut:

“Anak berkebutuhan khusus memerlukan ruang yang baik pula di dalam sebuah lingkungan anak. Agar, tidak adanya rasa diskriminasi yang terjadi diantara anak. Selain itu, adanya Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) tingkat RW diperlukan untuk membahas mengenai kesejahteraan anak berkebutuhan khusus dan macam- macam kesehatan dasar yang diperlukan

dalam sebuah kampung. Karena perlu diketahui bahwa, kebutuhan dari masing-masing kampung berbeda-beda.”(I Sutikno, wawancara 12 November 2018 pukul 14.00 WIB).

Meskipun demikian, perencanaan kampanye yang dilakukan tokoh masyarakat untuk indikator kesehatan dasar dan kesejahteraan anak berkebutuhan khusus dilakukan dengan menerapkan sistem penarikan dana pada setiap bulannya. Hal itu dipaparkan oleh Joko Sularno sebagai berikut:

“Saya dulu menggunakan sistem penarikan dana mbak di setiap bulannya. Penarikan dana dilakukan pada setiap KK (Kartu Keluarga). Penarikan dana tersebut sebanyak Rp.500,- per bulannya. Harapannya, dari dana yang terkumpul disetiap bulan dari masing-masing keluarga untuk menunjang kesehatan dasar dan pendidikan yang ada disini.”(Joko Sularno, wawancara 03 November 2018 pukul 16.00 WIB).

Berdasarkan analisis penulis, bahwa dalam perencanaan kampanye yang telah dilakukan oleh tokoh masyarakat telah mampu membuat sistem untuk menunjang bidang-bidang tertentu. Tokoh masyarakat menerapkan sistem yang dapat mengurangi beban dari setiap kepala keluarga untuk perawatan anak dan pendidikan. Meskipun, dalam penanganan kesejahteraan anak berkebutuhan khusus belum masuk dalam tahap pembuatan fasilitas seperti jalan khusus dan lain sebagainya.

d) Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang

Perencanaan kampanye program kampung ramah anak pada Kampung Badran RW 11 telah memperhatikan indikator pendidikan dan pemanfaatan waktu luang. Dengan adanya kampung ramah anak, selain anak-anak dapat merasa leluasa dan bebas berada di dalam lingkungannya, anak juga harus mendapatkan hal positif ketika sedang berada di lingkungannya.

Pemanfaatan waktu luang dengan kegiatan yang baik mampu mengantarkan anak-anak menjadi lebih kreatif dan memiliki pikiran yang terbuka serta wawasan yang lebih luas. Hal tersebut telah dipikirkan oleh para tokoh masyarakat dalam merancang kegiatan. Pendidikan dasar yang berada dalam Kampung Badran RW 11 adalah PAUD, mengenai hal tersebut Joko memaparkan sebagai berikut:

“Salah satu permitraan dengan CSR Sari Husada menghasilkan sebuah koperasi. Koperasi tersebut disetiap awal tahun pembukaan tabungan, kami menyisihkan hasil dari koperasi sebanyak 10% untuk kegiatan PAUD.”(Joko Sularno, wawancara 03 November 2018 pukul 16.00 WIB).

Menurut Sariman, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dalam Kampung Badran RW 11 dilakukan sesuai dengan program-program yang dilakukan oleh forum anak kampung. “Kan sudah diberikan wadah, tentu mereka

akan mengembangkannya dengan baik.”(Sariman, wawancara 03 November 2018 pukul 20.00 WIB).

Pentingnya pendidikan bagi anak telah menjadi perhatian bagi pihak-pihak yang terkait. Tentunya, hal itu juga disampaikan oleh Hendro Basuki, sebagai berikut:

“Jangan sampai anak hanya tahu ilmu fisika, matematika. Namun juga ditambah dengan budaya dan seni. Jadi lengkap, anak tidak hanya pintar namun memiliki etika dan moral.”(Hendro Basuki, wawancara 12 November 2018 pukul 15.00 WIB).

Hal senada dipaparkan oleh I Sutikno dalam menganggapi pendidikan anak dalam kampung ramah anak, sebagai berikut:

“Orientasi anak-anak berada di luar. Ada ruas untuk literasi, minat dan bakat, hobi dan penalaran. Penalaran yang dimaksud adalah anak diajak dilatih berdepat dengan cara yang baik. Namun, kalo bisa tidak terlepas dari pancasila.”(I Sutikno, wawancara 12 November 2018 pukul 14.00 WIB).

Dari pemaparan informan, maka dapat diartikan bahwa perencanaan kampanye dalam bidang pendidikan dilakukan oleh tokoh masyarakat masih dalam pengoptimalan dari PAUD yang termasuk dalam pendidikan formal bagi anak.

Dari hasil pengamatan penulis, di Kampung Badran RW 11 terdapat taman bermain masyarakat. Taman bermain masyarakat tersebut menjadi salah satu wadah untuk perencanaan kampanye dalam indikator pendidikan

dan pemanfaatan waktu luang. Karena melalui taman bermain masyarakat tersebut, anak dapat mengisi waktu luang dengan hal positif. Hal tersebut diperkuat dengan dokumentasi yang dikirimkan oleh Joko Sularno yang memberikan informasi mengenai taman belajar masyarakat tersebut.

Gambar 7
Kegiatan Mengisi Waktu Luang



Sumber: Dokumentasi Joko

Berdasarkan data yang diperoleh, adanya taman bermain masyarakat yang diberi nama TBM Bordronoyo membantu anak-anak dalam melakukan kegiatan pendidikan dan pemanfaatan waktu luang. Meskipun terbentuknya taman bermain masyarakat ini sejak 2007, namun dengan adanya kampanye program kampung ramah anak, adanya TBM Bordronoyo dapat dioptimalkan tokoh masyarakat sebagai salah satu bentuk perencanaan

kampanye pada indikator pendidikan dan pemanfaatan waktu luang.

Selain itu, pemanfaatan waktu luang yang dilakukan oleh tokoh masyarakat adalah dengan mendatangkan beberapa narasumber saat diadakannya sebuah acara di Kampung Badran RW 11. Narasumber yang didatangkan merupakan narasumber yang tentunya bermanfaat bagi anak-anak.

“Anak-anak ini kan masih kosong mbak, harapan saya dengan mengundang pihak-pihak yang dapat mempengaruhi ke arah positif kan bagus. Sedini mungkin dikenalkan dengan hal-hal yang baik, agar kedepannya mereka lebih siap menghadapi segala sesuatunya.”(Sariman, wawancara 03 November 2018 pukul 20.00 WIB).

Dari data yang telah diperoleh, maka dapat diartikan bahwa tokoh masyarakat telah mampu mengoptimalkan program-program terdahulu untuk dijadikan sebagai salah satu strategi perencanaan kampanye di bidang pendidikan dan pemanfaatan waktu luang. Bukti-bukti yang ada telah dipaparkan melalui hasil wawancara dan cuplikan yang dilakukan penulis dengan informan. Meskipun dalam perencanaan kampanye di indikator pendidikan dan pemanfaatan waktu luang kurang adanya inovasi program.

e) Perlindungan Khusus

Perencanaan kampanye yang banyak ditekankan oleh tokoh masyarakat Kampung Badran RW 11 adalah

mengenai perlindungan khusus bagi anak. Tokoh masyarakat tidak memungkiri bahwa harapan dengan adanya program kampung ramah anak yang utamanya adalah pemenuhan hak anak, orang tua dan sekitarnya mampu menyadari bahwa kewajiban yang harus dilakukan kepada anak tidak hanya sekedar menyekolahkan dan memberikan makanan, namun juga memberikan perlindungan. Perlindungan khusus yang diberikan kepada anak dapat diartikan dalam berbagai hal. Dalam setiap kampung, memiliki kebutuhan tersendiri dari mengartikan sebuah perlindungan. Perlindungan yang menjadi fokus pada tokoh masyarakat Kampung Badran RW 11 adalah perlindungan dari kekerasan anak. Hal tersebut dipaparkan oleh Joko Sularno, sebagai berikut:

“Dulu, ada beberapa orang yang melakukan kekerasan anak. Dan yang melakukan itu orang tuanya sendiri. KDRTlah. Jadi kami fokusnya disitu. Memberitahu orang tua agar tidak melakukan kekerasan anak lagi.”(Joko Sularno, wawancara 03 November 2018 pukul 16.00 WIB).

Hal senada diungkapkan oleh Sariman mengenai kekerasan pada anak. “Dulu kalo ada kekerasan anak, yang lain diam saja. Tidak peduli.”(Sariman, wawancara 03 November 2018 pukul 20.00 WIB).

Kekerasan anak yang terjadi di Kampung Badran RW 11 merupakan kekerasan fisik dan non fisik di dalam sebuah keluarga. Dalam perencanaan kampanye yang untuk

menanggulangi kekerasan anak didalam keluarga adalah dengan memberikan penyuluhan pada orang tua melalui kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Kampung Badran RW 11. “Penyuluhan dilakukan secara wilayah, baik tingkat RT maupun RW.”(Anastasia Partini, wawancara 03 November 2018 pukul 19.00 WIB).

Melalui penyuluhan, tokoh masyarakat memberikan pengertian bahwa tindakan kekerasan pada anak yang dilakukan orang tua juga dapat mendapatkan hukuman. Selain itu, tokoh masyarakat memperkenalkan hukum yang mengatur mengenai hak anak, salah satunya dengan larangan melakukan kekerasan pada anak. “Perlindungan kita fokuskan pada kekerasan anak, dengan cara masyarakat diberikan pemahaman mengenai undang-undang yang berlaku.”(Joko Sularno, wawancara 03 November 2018 pukul 16.00 WIB).

Selain perlindungan yang berfokus pada kekerasan anak, perlindungan lain juga diberikan kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Maraknya kasus yang melibatkan anak, seperti klitih dan tawuran membuat tokoh masyarakat juga meresahkan hal tersebut. Perlindungan yang akan dilakukan adalah dengan menyisipkan narasumber dari berbagai pihak untuk menyinggung terkait

kenakalan anak yang marak terjadi. Dengan hal tersebut, anak-anak mengetahui konsekuensi apabila terlibat ke dalam kasus kenakalan anak. “Kalo pas ada acara yang melibatkan masyarakat banyak, kadang saya sisipkan pesan-pesan tentang kekerasan anak juga dan hukuman yang diberikan.”(Joko Sularno, 03 November 2018 pukul 16.00 WIB).

Hendro Basuki mengatakan, adanya tujuan perlindungan anak adalah sesuatu yang dari awal harusnya menjadi utama dari adanya kampanye program kampung ramah anak.

“Perlindungan yang baik disesuaikan dengan kebutuhan yang berada didalam sebuah kampung. Selain itu, adanya program kampung ramah anak itu ya untuk melindungi hak-hak anak tersebut. Hak-hak anak inilah yang menjadi tugas dari tokoh masyarakat dan para ketua RW.” (Hendro Basuki, wawancara 12 November 2018 pukul 15.00 WIB).

Namun apabila dari kacamata KPAI, untuk masalah perlindungan terhadap anak, I Sutikno bersama tim menjadi seseorang yang peka terhadap masalah yang melibatkan perlindungan pada anak.

“Bahkan untuk strateginya sendiri, KPAI telah menyiapkan sendiri. KPAI selalu memberikan pengawasan apabila diperlukan dalam sebuah permasalahan yang dihadapi oleh seorang anak.”(I Sutikno, wawancara 12 November 2018 pukul 14.00 WIB).

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari informan, penulis menganalisis pada perencanaan kampanye indikator perlindungan khusus, tokoh masyarakat secara sadar dan mantap untuk menaruh fokus pada kekerasan anak. Menurut informan tokoh masyarakat, kekerasan anak dalam Kampung Badran RW 11 menjadi sesuatu yang darurat sehingga harus ditanggulangi. Perencanaan kampanye untuk menanggulangi kekerasan anak telah direncanakan dengan memberikan pesan-pesan dan pemahaman kepada orang tua dan masyarakat.

Pada teori tahapan perubahan (Venus,2004:39), perencanaan kampanye masuk dapat di kategorikan dalam tahapan *contemplation* (perenungan) dan *preparation* (persiapan). Tahapan perenungan terlihat dari tokoh masyarakat yang mulai sadar dengan adanya sebuah tindakan yang harus dilakukan untuk melindungi hak anak di dalam lingkungannya. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Hendro Basuki, sebagai berikut:

“Adanya kampung ramah anak itu yang menjadikan adalah tokoh masyarakat mereka. Memang, programnya dari kita. Namun tidak ada penunjukan pada sebuah kampung. Jadi, tokoh masyarakatnya sendiri datang ke kita bilang kalo kampungnya ingin dijadikan kampung ramah anak. Karena ingin melindungi hak anak di dalam kampungnya.”(Hendro Basuki, wawancara 12 November 2018 pukul 15.00 WIB).

Dengan pernyataan tersebut, maka dapat diartikan tokoh masyarakat mulai merenungi masalah yang ada di lingkungan,

sehingga kemudian mendaftarkan diri menjadi kampung ramah anak. Tahapan persiapan terlihat dari tokoh masyarakat yang telah mempersiapkan perencanaan kampanye didalam kampungnya.

B. Pelaksanaan Kampanye Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Yogyakarta

Pelaksanaan kampanye merupakan tahapan selanjutnya setelah diadakannya perencanaan kampanye. Pelaksanaan kampanye program kampung ramah anak di Kampung Badran RW 11 dilakukan secara berkelanjutan dan dilakukan oleh beberapa tokoh masyarakat. Meskipun dalam mengaplikasikan kampanye mereka menggunakan bantuan dari segenap lapisan masyarakat untuk menyelesaikan program yang telah direncanakan. Dalam tahap pelaksanaan kampanye, penulis menjabarkan pelaksanaan kampanye sesuai tahapan dalam pelaksanaan kampanye, antara lain (Venus,2004:200):

1. Realisasi Unsur Kampanye

Pada sebuah pelaksanaan, terkadang sesuatu yang telah direncanakan akan berubah dan berbeda dengan yang dilaksanakan. Hal tersebut dapat dimaklumi asalkan tidak jauh dari tujuan yang ditentukan. Perbedaan tersebut juga dialami saat merencanakan kampanye dan menjalankan kampanye. Pemberian pesan yang direncanakan dalam perencanaan kampanye adalah menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami serta tidak menyebarkan *hoax*.

Karena pemusatan fokus permasalahan adalah kekerasan anak yang dilakukan oleh orang tua, maka pesan-pesan yang disampaikan oleh tokoh masyarakat dan pendamping kampanye mengarah kepada kekerasan anak. Konstruksi pesan dalam kampanye kampung ramah anak melalui pesan-pesan yang disampaikan saat pertemuan tersebut. Saat pelaksanaan kampanye, pesan yang disampaikan sama pada saat perencanaan kampanye.

“Pesan yang diulang-ulang terus akan tertanam di pikiran mereka. Biar setiap mereka melakukan tindakan yang menyimpang, mereka mengingat pesan yang telah disampaikan oleh kami.”(Joko Sularno, wawancara 03 November 2018 pukul 16.00 WIB).

Dari pernyataan diatas, maka pemberian pesan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat telah berlangsung dengan terus-menerus. I Sutikno memberikan pernyataan, sebagai berikut:

“Sekarang kan teknologi juga sudah banyak dan berkembang mbak. Pesan itu dapat dimanfaatkan lewat teknologi itu. Grup *whatsapp* di setiap perkumpulan masyarakat kan tentunya ada. Apalagi ini di perkampungan kota.” (I Sutikno, wawancara 12 November 2018 pukul 14.00 WIB).

Maka dari pemaparan informan dapat diartikan pemberian pesan saat pelaksanaan kampanye telah melalui berbagai cara dengan memperhatikan bahasa serta penggunaan media. Pelaksanaan kampanye menghasilkan respon yang beragam dari masyarakat. Hal seperti itu dapat dipahami karena setiap masyarakat memiliki karakter dan sikap yang berbeda dalam menanggapi sesuatu. “Macem-macem, di kader yang aktif di

masyarakat tahu dan paham. Untuk yang tidak ya masa bodoh dan acuh tak acuh. Tapi sejauh ini positif.”(Joko Sularno, wawancara 03 November 2018 pukul 16.00 WIB).

Respon yang beragam juga dirasakan oleh Hendro dalam menyampaikan kampanye program kampung ramah anak:

“Saya menghadapi masyarakat yang beragam. Ada masyarakat yang menanggapi dengan baik, namun banyak pula yang tidak menanggapi dengan baik dan seakan tidak peduli. Tidak semua masyarakat dengan baik. Bagi yang tidak menanggapi gagasan kampanye program kampung ramah anak mungkin masyarakat yang kurang paham dan tidak memperdulikan dengan keadaan anak didalam lingkungan kampungnya. “(Hendro Basuki, wawancara 12 November 15.00 WIB).

Namun respon baik didapatkan oleh Sutikno:

“Anak terutama merespon dengan baik dengan adanya kampung ramah anak. Karena anak merasakan bahwa haknya diberikan oleh pemerintah. Pada setiap peringatan hari anak, anak selalu memberikan pernyataan kepada walikota. I Sutikno, wawancara 12 November 2018 pukul 14.00 WIB).

Pengamatan penulis mengenai repon yang telah dirasakan oleh tokoh masyarakat menjadi sebuah tantangan tersendiri karena tetap menjalankan kepeduliannya dalam mengedepankan hak anak, dengan beragam respon. Dari beragam respon yang diterima, tokoh masyarakat tetap melakukan kampanye kampung ramah anak melalui pemberian pesan yang berulang.

2. Menyeleksi Penyampai Pesan Kampanye

Menurut Venus (2004:200), pelaksanaan kampanye memiliki beberapa tahapan. Tahapan tersebut masuk dalam

realisasi unsur-unsur kampanye. Dalam kampanye kampung ramah anak, realiasi unsur-unsur kampanye dimulai dari pemilihan komunikator kampanye. Saat pelaksanaan kampanye, langkah yang diterapkan telah sesuai dengan kondisi lingkungan. “Komunikator adalah orang-orang yang memiliki massa dan memiliki pengaruh pada sebuah kelompok masyarakat.”(Joko Sularno, wawancara 12 November 2018).

Menurut Hendro, pemilihan seorang komunikator yang baik dalam melakukan kampanye adalah seseorang yang memiliki materi, serta menguasai materi yang akan dikampanyekan kepada khalayak serta kemampuan menguasai audiens.

“Penguasaan audiens maskutnya adalah saat melakukan kampanye, tidak hanya menyampaikan materi namun juga berimprovisasi agar khalayak yang menerima kampanye dengan mudah menerima serta tidak bosan saat pelaksanaan kampanye.”(Hendro Basuki, wawancara 12 November 2018 pukul 15.00 WIB).

Tokoh masyarakat telah menyadari bahwa pemilihan komunikator untuk menyampaikan kampanye sangat penting dalam pelaksanaan kampanye. Hal tersebut terbukti dengan keaktifan dari masing-masing perkumpulan masyarakatnya untuk memberi masukan mengenai hak-hak anak.

3. Menyeleksi Saluran Kampanye

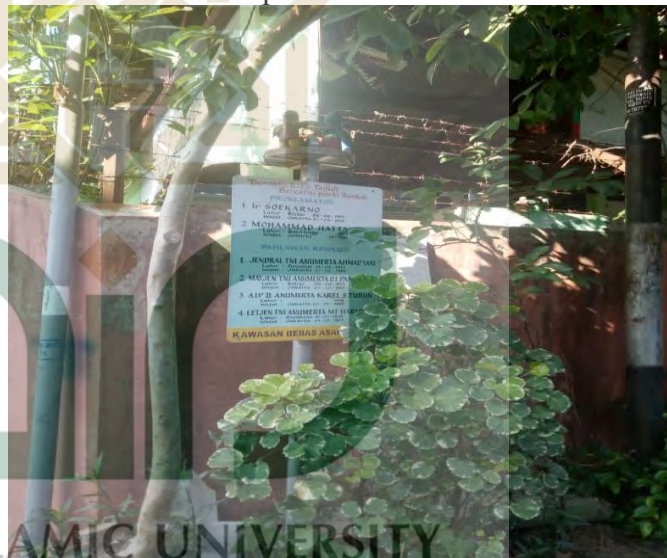
Selain itu, penggunaan media juga termasuk dalam interpretasi dari pesan kampanye tersebut. Media yang digunakan

saat pelaksanaan kampanye senada dengan yang telah direncanakan, yaitu pemasangan papan-papan diberbagai titik.

“Saat ini yang coba kita pakai adalah kita memasang plang-plang nama pahlawan diberbagai titik, masang plakat hak-hak anak. Selain itu kami mengadakan penyuluhan melalui grup-grup kader masyarakat.”(Sariman, wawancara 03 November 2018 pukul 20.00 WIB).

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya papan yang telah tersebar dalam kampung ramah anak Badran RW 11.

Gambar 8
Papan Hak Anak



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Berdasarkan pengamatan penulis, adanya plang hak anak, dan media yang lain mengenai anak tersebar di dalam Kampung Badran RW 11, pada setiap RT. Plang hak anak tersebut berkelenjutan, hal tersebut untuk memancing pemahaman anak mengenai jumlah hak anak yang harus diketahui.

Menurut analisis penulis hal tersebut dirasa lebih efektif untuk digunakan di sebuah kampung, karena setiap masyarakat pasti akan melewati berbagai titik tersebut, agar masyarakat dapat mengingat kemudian mempelajari dan paham mengenai hak-hak anak yang sering dikampanyekan oleh tokoh masyarakat dan komunikator. Pemilihan media yang tepat akan berpengaruh pada pesan yang diterima oleh khalayak. Karena, selain dengan menggunakan cara masuk ke kelompok masyarakat, media sebagai penunjang untuk memahamkan pesan kampanye.

Pada tahapan pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh tokoh masyarakat terdapat beberapa macam kegiatan yang sesuai dengan yang telah direncanakan dalam perencanaan kampanye, namun ada juga program-program tambahan yang merupakan inisiatif dari perkumpulan masyarakat di dalam Kampung Badran RW

11.

a) Hak Sipil dan Kebebasan

Dalam pelaksanaan kampanye, sesuai dengan rancangan yang telah direncanakan oleh tokoh masyarakat bahwa hak untuk mengemukakan keinginan telah direncanakan dalam pembentukan sebuah wadah bernama forum anak kampung. Forum Anak Kampung ini menjadi

salah satu wadah bagi anak-anak dalam mengemukakan kebebasan dan keinginan. Setelah didirikannya PATRIOT telah berjalan, kemudian muncul Muda-Mudi Badran(Mudiba).

Meskipun beranggotakan kurang lebih orang yang sama, namun dengan kehadiran Mudiba mampu menjadi alternatif forum anak kampung yang belum mampu beregenasi. Dalam Mudiba, terdapat berbagai kegiatan yang dilakukan. Mudiba juga mendukung kegiatan pendidikan non formal yang bervariasi. Meskipun dengan nama yang berbeda, namun Mudiba masih dalam takaran forum anak kampung karena tujuannya adalah menjadi wadah dari anak-anak di Kampung Badran RW 11.

“Tujuan kampanye dalam pemenuhan hak anak sudah sesuai dengan kebebasan anak dalam mengemukakan keinginan dan pendapat, bentuknya dengan pembentukan forum anak kampung PATRIOT yang kemudian berkembang muncul forum Muda-mudi Badran. Tentu hal itu menjadi wadah anak-anak dalam penyaluran kegiatan positif”(Sariman, wawancara 03 November 2018 pukul 20.00 WIB).

Pengembangan kegiatan forum anak kampung belum berjalan secara optimal, dikarenakan tingkat kesibukan dari anggota yang lambat laun menjadi dewasa.

Menurut I Sutikno, selaku ketua KPAI, sebagai berikut:

“Kebebasan mengemukakan keinginan menjadi hal yang positif karena dengan setelah adanya kampung

ramah anak, awalnya anak-anak tidak didengar menjadi didengar. Jadi, kampung ramah anak tersebut dapat sangat dikembangkan. kreativitas adalah milik pemuda. Melalui wadah forum anak kampung, mereka mampu mengembangkan kegiatan sesuai dengan kreativitasan yang dimiliki oleh anak. “Kita mengajak semua kampung agar demokratisnya terjamin.”(I Sutikno, wawancara 12 November 2018 pukul 14.00 WIB).

Dari pemaparan informan dan pengamatan penulis, adanya forum anak kampung PATRIOT dalam pelaksanaan kampanye masih ada wadahnya. Namun, fungsinya lebih dioptimalkan dengan adanya Mudiba. Apabila melihat dari fungsi yang tetap menjadi tempat menyalurkan kegiatan positif, maka dapat diartikan pelaksanaan kampanye dalam indikator hak sipil dan kebebasan masih terpantau dengan baik. Namun, ketidak aktifan dari PATRIOT seharusnya tetap digali kembali. Agar PATRIOT dan Mudiba dapat berjalan bersama.

b) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yang telah direncanakan oleh tokoh masyarakat dengan pemberian penyuluhan pesan-pesan kepada para orang tua melalui forum kelompok masyarakat yang ada di Kampung Badran RW 11. Dalam pelaksanaan kampanye, hal tersebut sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.

Tokoh masyarakat masuk melalui kelompok masyarakat untuk memberikan informasi mengenai penjaminan sosial lingkungan keluarga, serta pola asuh yang baik. Dengan melakukan kampanye untuk penjaminan sosial anak, masyarakat terutama orang tua semakin memahami kebutuhan dari seorang anak. “Kami tidak akan pernah bosan untuk membina para orang tua, agar pengetahuannya semakin baik. Dan hak anak juga dapat terwujud.”(Sariman, wawancara 03 November 2018 pukul 20.00 WIB). Dengan kesadaran bahwa lingkungan keluarga merupakan tempat yang baik untuk seorang anak, orang tua mampu memberikan dukungan dalam proses pelaksanaan kampanye, karena kampanye program kampung ramah anak pada akhirnya akan mengurangi beban dari orang tua. “Kalo anak mampu bersosialisasi diluar dengan baik, maka lingkungan keluarganya juga mendorong ke arah positif.”(I Sutikno, wawancara 12 November 2018 pukul 14.00 WIB).

Dengan pernyataan diatas maka dapat dilihat peran orang tua dalam pelaksanaan kampanye adalah memahami betul mengenai hak-hak anak yang telah dikampanyekan oleh para tokoh masyarakat. Orang tua tidak menekan anak seperti yang sebelumnya dilakukan dalam keluarga yang telah dipaparkan dalam perencanaan kampanye oleh tokoh

masyarakat. Dengan mendidik anak dengan baik, maka orang tua juga membantu untuk menyumbangkan generasi yang baik untuk Indonesia.

c) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Anak Berkebutuhan Khusus

Sesuai dengan perencanaan kampanye, pelaksanaan dari indikator kesehatan dasar dan kesejahteraan telah sesuai dengan apa yang dirancang. Dengan melakukan pemitraan bersama CSR Sari Husada, mampu meringankan beban dari beberapa masyarakat. Dengan pembentukan POSYANDU di Kampung Badran RW 11, kesehatan dasar bagi anak mampu terbantu. Selain itu, POSYANDU juga aktif dalam informasi mengenai anak. Setelah adanya POSYANDU, kemudian program berkembang pada program BUNDA MENGAJAR. Program tersebut

memfokuskan orang tua khususnya seorang ibu. Hal tersebut dibuktikan dengan penemuan plang salah satu program dari BUNDA MENGAJAR yang berada di Kampung Badran RW 11.

Gambar 9
Program BUNDA MENGAJAR



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Permasalahan kesejahteraan anak, menjadi topik yang selalu dibahas apabila diadakan forum bersama kelompok masyarakat. “Dalam penanganan beberapa masalah sosial, memang kita bermitra dengan CSR Sari Husada.”(Joko Sularno, wawancara 03 November 2018 pukul 16.00 WIB).

Pendampingan untuk mencari program-program pemerintah juga dilaksanakan demi mewujudkan kebutuhan anak. Pernyataan menarik dikemukakan oleh I Sutikno:

“Kita punya filosofi jawa mbak. Sebaiknya menggunakan filosofi jawa yaitu “Gandeng Gendhong”. Filosofi itu bahas tentang kota Yogyakarta yang mampu memberikan kasih sayang antara sesama. Maka dari itu, diusahakan tidak ada diskriminasi yang terjadi. Termasuk dari kesejahteraan.”(I Sutikno, wawancara 12 November 2018 pukul 14.00 WIB).

Penanganan kesehatan dasar dan kesejahteraan anak baik berkebutuhan khusus atau tidak, akan tetap dilakukan dengan bekerjasama dengan dinas kesehatan dan dinas sosial kota Yogyakarta. Sesuai dengan perencanaan yang dikatakan oleh Hendro, bahwa kampung ramah anak akan sukses apabila mampu menyatukan sinergi dari beberapa sektor demi tujuan yang baik.

Berdasarkan pemaparan dari pernyataan informan, pelaksanaan kampanye program kampung ramah anak pada indikator ini masih pada program pada umumnya dan belum melakukan penambahan program dari masyarakat.

Pelaksanaan kampanye pada indikator kesehatan dasar dan kesejahteraan anak berkebutuhan khusus dikembangkan melalui mitra CSR dari Sari Husada, bukan dari inisiatif dari tokoh masyarakat yang membuat program.

d) Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang

Pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dalam ranah pelaksanaan kampanye tidak hanya sesuai dengan perencanaan yang telah di buat, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa penambahan kegiatan. Pada perencanaan kampanye, kegiatan pendidikan dan pemanfaatan waktu luang mengoptimalkan adanya TBM

Bodronoyo yang telah dibentuk sejak tahun 2007 serta pengadaan PAUD.

Gambar 10
Papan PAUD



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Namun seiring dengan berkembangnya waktu maka program pelaksanaan kampanye ikut berkembang. Berdasarkan percakapan penulis dengan salah satu pengurus dari Mudiba, Wahyu. Pada tahun 2016 Mudiba memiliki strategi untuk membentuk jaringan seluas-luasnya dengan organisasi lain. Satu keberhasilan dari pembentukan jaringan tersebut adalah adanya kerjasama dengan komunitas YM (Yogyakarta Mengajar) dan Atap Senja. Kedua komunitas tersebut bergerak di bidang pendidikan yang kemudian membentuk suatu program Jam belajar masyarakat(JBM).

Gambar 11
Suasana JBM



Sumber: Dokumentasi Pengurus Mudiba

Berdasarkan dari pengamatan penulis, adanya JBM menunjang kegiatan pendidikan dan pemanfaatan waktu luang yang ada di Kampung Badran RW 11 karena selain mengajarkan pendidikan formal, JBM juga mengajarkan pendidikan karakter. Pembentukan JBM merupakan inisiatif dari Mudiba. Hal tersebut disampaikan oleh Wahyu:

“Jadi temen-temen Atap Senja ini tak ajak semacam eskperimen sosial bagaiamna caranya ngajar yang efektif di anak-anak bantaran sungai yang biasanya anaknya bandel. Tahun lalu mereka langsung 2 jam bantu ngerjain PR. Hasilnya gak ada perubahan sikap di anak-anak. Ya makanya tahun ini disisipkan pengetahuan lain termasuk perlaku.”(Wahyu, wawancara 29 November 2018 pukul 19.00 WIB).

Dari pemaparan di atas dapat diartikan dalam melaksanakan kampanye pada indikator pendidikan dan

pemanfaatan waktu luang dengan sadar dilakukan oleh Mudiba untuk bekerjasama dengan organisasi lain dalam pengembangan kegiatan positif.

“Mudiba juga buat kegiatan bernama Seniningan(Seni dan Obrolan Ringan). Seniningan dibentuk untuk ajang berkumpul anak-anak serta menukarkan ide dan informasi. Seni yang dimaksud dalam nama ini adalah bernyanyi. Nyanyian yang dinyanyikan bertemakan pendidikan, serta obrolan yang diperbincangkan ranahnya pada bidang pendidikan. Namun, karena Seniningan merupakan sebuah program terobosan yang bagus, program ini berkembang dengan mengajak RW lain untuk berkolaborasi. Pada saat proses kolaborasi, pemerintah kelurahan mengambil alih program ini untuk dinaikkan setara dengan kelurahan. Maka dari itu, program ini kemudian vakum setelah 5 kali berjalan.”(Sariman, wawancara 03 November 2018 pukul 20.00 WIB).

Hal senada disampaikan oleh I Sutikno dalam pernyataannya, sebagai berikut:

“Pelaksanaan kegiatan pendidikan yang telah dibantu oleh komunitas dapat memberikan hal yang baik. Dan komunitas tersebut tidak hanya mengajarkan pendidikan secara formal, karena komunitas tersebut mengajarkan kegiatan pendidikan non formal juga yang membuat anak-anak dapat mengasah kreativitasnya. Kegiatan pendidikan dapat dikembangkan dengan penambahan budi pekerti dan wawasan kebangsaan. Itu bisa menjadikan anak menjadi ideologis. Jangan sampai radikalisme dan fanatisme”(I Sutikno, wawancara 12 November 2018 pukul 14.00 WIB).

Pada perencanaan kampanye direncanakan bahwa pemanfaatan waktu luang di isi dengan menghadirkan narasumber yang dapat bermanfaat bagi anak. “Dulu kita

pernah mengundang BNN (Badan Narkotika Nasional) untuk memberikan materi pada anak.”(Sariman, wawancara 03 November 2018 pukul 20.00 WIB). Pelaksanaan kampanye pemanfaatan waktu luang juga di manfaatkan untuk kegiatan olahraga.

Berdasarkan analisis penulis, pelaksanaan kampanye pada indikator pendidikan dan pemanfaatan waktu luang banyak dibantu dengan keaktifan dari Mudiba yang mulai menyadari bahwa pentingnya kegiatan positif yang melibatkan anak dalam setiap kegiatan yang ada. Selain itu, pemanfaatan waktu luang juga dilakukan secara baik dengan mendatangkan narasumber yang sesuai dengan kondisi permasalahan anak di jaman sekarang.

e) Perlindungan Khusus

Dalam pelaksanaan kampanye, perlindungan khusus yang diberikan oleh tokoh masyarakat adalah mengamati apabila terjadi kekerasan pada anak yang dilakukan oleh orang tua. Pada pelaksanaan kampanye, selain mendapatkan penyuluhan tentang perundang-undangan mengenai kekerasan anak. Tetangga juga dihimbau untuk lebih peduli terhadap sesama apabila melihat kasus kekerasan anak terjadi.

“Meskipun terdapat hak-anak anak yang selalu diperjuangkan dan berusaha dipenuhi, namun bukan berarti anak dapat dimanjakan dengan adanya undang-undang hak anak. Apabila anak mendapatkan kasus yang melibatkan badan hukum, harus mengikuti proses hukum yang berlaku.”(Hendro Basuki, wawancara 12 November 2018 pukul 15.00 WIB)

Kejadian tersebut pernah dilalui oleh salah satu anak yang di duga melakukan pencurian di akademi keperawatan di daerah Kampung Badran.

Joko selaku ketua RW pada waktu itu ikut andil dalam penanganan anak tersebut. “Saya ikut dampingi, meskipun pada akhirnya anak tersebut tetap harus mengikuti proses hukum yang berlaku.”(Joko Sularno, wawancara 03 November 2018 pukul 16.00 WIB). Kasus tersebut dibenarkan adanya dengan pernyataan Anastasia Partini:

“Iya dulu memang pernah ada anak yang bermasalah dengan pencurian. Tapi didampingi sama pak Joko untuk menyelesaikan masalah itu. Sekarang warga ya jadi tahu, kalo melakukan tindak kejahatan pasti tetap harus lewat jalur hukum yang ada.”(Anastasia Partini, wawancara 03 november 2018 pukul 19.00 WIB).

Perlindungan anak menurut Hendro, apabila terjadi sebuah kasus yang berhubungan dengan anak, maka perlindungan anak dilakukan melalui P2PT2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak).

“Melalui badan tersebut, anak yang mengalami tindak kekerasan akan diberikan perlindungan yang sesuai. Hendro juga memberikan informasi bahwa pernah terjadi tindak kekerasan pada anak yang kemudian diurus melalui badan tersebut”(Hendro Basuki, wawancara 12 November 2018 pukul 15.00 WIB).

Lembaga KPAI erat hubungannya dengan anak, I

Sutikno menyampaikan:

“Apabila terjadi tindak kekerasan anak atau masalah dengan anak sebagai korban, KPAI akan mendampingi sampai pada akar permasalahan yang dihadapi telah selesai. Sutikno mengatakan, bahwa tanpa diminta, KPAI akan tetap menjemput dan mendampingi permasalahan anak sampai tuntas.”(I Sutikno, wawancara 12 November 2018 pukul 14.00 WIB).

Berdasarkan pemaparan informan, penulis menganalisis bahwa dalam pelaksanaan kampanye pada indikator perlindungan khusus telah menjadi sebuah fokus dari tokoh masyarakat dan pihak terkait. Kepedulian dalam melindungi anak, terutama saat terjadi kekerasan pada anak sangat diperhatikan karena di dalam Kampung Badran RW 11 karena tujuan dan fokus permasalahannya ada pada kekerasan anak. Meskipun pelaporan mengenai kekerasan anak tidak dibukukan. Maka dari itu, tokoh masyarakat dan bantuan pendampingan dari berbagai pihak mengatasi permasalahan kekerasan pada anak yang terjadi di Kampung Badran RW 11. Pihak-pihak yang terlibat dalam menangani perlindungan anak juga telah sadar untuk

memberikan rasa kepeduliannya pada kasus-kasus mengenai perlindungan anak.

Dalam melaksanakan perlindungan khusus pada anak, peran orang tua juga penting. Karena apabila orangtua paham dengan pentingnya melakukan perlindungan pada anak, tidak akan ada terjadi kekerasan anak yang dilakukan orang tua. Pada kenyataannya, sering kali secara tidak sengaja melakukan kekerasan pada anak dengan fisik maupun non fisik. Perlakuan fisik dapat ditanggulangi dengan adanya teguran dari tetangga dan peraturan undang-undangan, namun perlakuan kekerasan non fisik masih belum mengalami kemajuan.

Tidak disadari, orangtua dapat berbicara yang tidak pantas kepada anaknya. Jika hal tersebut dilakukan secara terus menerus maka mental anak akan menjadi rusak

dan anak dapat menirukan yang biasa telah di katakan orang tuanya. Pemahaman kepada orang tua mengenai kekerasan non fisik yang dapat dipikirkan oleh tokoh masyarakat berserta lapisan masyarakat di perlukan.

Namun, langkah pelaksanaan kampanye yang telah dilakukan oleh tokoh masyarakat sudah cukup baik karena mau bertindak dan mendampingi anak dalam menghadapi kasus yang berhubungan dengan perlindungan anak.

Menurut teori tahapan perubahan (Venus. 2004:39) pelaksanaan kampanye masuk kedalam tahapan tindakan (*action*). Hal itu dibuktikan dengan pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh tokoh masyarakat bersama lapisan masyarakat. Dengan pelaksanaan tersebut, dapat menunjukkan bahwa masyarakat telah sadar dan mempunyai keinginan untuk melakukan perubahan perilaku.

C. Evaluasi Kampanye Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Yogyakarta

Setelah melakukan tahap perencanaan dan pelaksanaan, tahapan akhir dari sebuah kampanye adalah evaluasi. Dengan evaluasi, kampanye dapat diketahui tolak ukur keberhasilan yang telah diraih. Kampanye juga dapat diperbaiki kedepannya dengan melihat evaluasi-evaluasi dari telah dilaksanakan. Liliweri membagi evaluasi menjadi tiga, yaitu evaluasi formatif, proses, dan outcomes. Dari beberapa evaluasi kampanye tersebut akan didisatukan dengan keadaan lapangan, sebagai berikut:

1. Evaluasi Proses

Menurut Liliweri, evaluasi proses adalah evaluasi yang membahas mengenai evaluasi proses secara keseluruhan dari sebuah kampanye. Apabila di aplikasikan pada saat kampanye program kampung ramah anak, evaluasi proses dimulai dari mengetahui kendala-kendala yang telah dirasakan oleh tokoh

masyarakat saat proses kampanye. Ketiga informan berkata senada mengenai kendala yang terjadi. Kendala yang dialami adalah dari segi SDM (Sumber Daya Manusia). “Mendapatkan orang-orang yang mau bekerjasama dengan baik itu tidaklah mudah. Apalagi ini ranahnya sosial.”(Sariman,wawancara 03 November 2018 pukul 20.00 WIB). Hal senada disampaikan oleh Anastasia Partini mengenai kendala yang dialami:

“Pemahaman kepada orang tua dan masyarakat luas merupakan salah satu kendala. Karena, meskipun telah melakukan banyak penyuluhan dan berulang apabila dari masyarakat dan orang tua tidak memiliki kesadaran tidak ada gunanya.”(Anastasia Partini, wawancara 03 November 2018 pukul 19.00 WIB).

Kendala tenaga juga disampaikan oleh Hendro:

“Dari DPMPPA hanya saya sendiri mbak yang menyampaikan kampanye ke kampung-kampung ramah anak. Hujan atau panas ya saya sendiri. Kalo saya berhalangan, baru diganti dengan yang lain.”(Hendro Basuki, wawancara 12 November 2018 pukul 15.00 WIB).

Hal tersebut menjadikan kampung ramah anak tidak di monitoring dengan baik. Dari 188 RW yang menjadi kampung ramah anak, Hendro kurang paham dengan perkembangan dari masing-masing kampung ramah anak tersebut. Kendala berbeda datang dari Sutikno, menurutnya kendala dalam kampanye kampung ramah anak adalah waktu.

“Waktu luang dari seorang anak yang susah untuk dilakukan pertemuan. Pagi anak sekolah, siang anak les, sore anak TPA. Paling ya sabtu atau minggu kalo mencari waktu luang anak.”(I Sutikno, wawancara 12 November 2018 pukul 14.00 WIB).

Pengamatan penulis mengenai kendala yang dihadapi oleh tokoh masyarakat membuat program-program yang direncanakan dan dilaksanakan tidak berjalan dengan baik dan optimal. Tokoh masyarakat perlu mengadakan program yang lebih bervariasi agar dapat diterima oleh masyarakat dan masyarakat juga berkeinginan untuk mewujudkan kondisi lingkungan yang baik untuk anak.

2. Evaluasi *Outcomes*

Evaluasi *outcomes* membahas mengenai pengukuran kampanye setelah kampanye dilaksanakan. Evaluasi ini dapat melihat perubahan dari sikap sasaran yang diberi kampanye sebanding dengan apa yang diharapkan oleh pelaku kampanye atau tidak. Pada program kampung ramah anak, evaluasi dilakukan oleh para tokoh masyarakat secara tidak langsung.

“Perubahan-perubahan dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat telah cukup dirasakan. Perubahan tersebut sangat terasa, saat pemasalahan kasus kekerasan pada anak oleh orang tua mulai rendah presentaseny dengan orang tua paham bahwa ada perundang-undangan tentang anak. Sekarang juga anak putus sekolah dikit mbak.”(Sariman,wawancara 03 November 2018 pukul 20.00 WIB).

Hal itu diperkuat dengan data yang telah diperoleh penulis, bahwa dari jumlah anak yang bersekolah di dalam Kampung Badran RW 11 terdapat enam anak yang putus sekolah. Ke-enam anak tersebut putus sekolah karena dokumen yang tidak lengkap, keterbelakangan mental dan berpisah dengan orang tua. Meskipun belum tuntas, namun jumlah anak yang putus sekolah sedikit, dan

itu juga menjadi evaluasi dari tokoh masyarakat yang kemudian meminta solusi dari program pemerintah.

Tokoh masyarakat berusaha menginisiatif dalam mengembangkan potensi yang ada di Kampung Badran RW11. “Perubahannya lebih baik, meskipun belum maksimal.”(Joko Sularno, wawancara 03 November 2018 pukul 16.00 WIB). Sutikno mengemukakan pendapatnya, bahwa perubahan telah dirasakan saat anak sudah berani melaporkan tindak kekerasan atau *bullying* yang dialami. “Anak datang ke sini, melaporkan tentang guru yang *bully* atau kekerasan lain.”(I Sutikno, wawancara 12 November 2018 pukul 14.00 WIB).

Dari informasi yang telah didapatkan, maka perubahan yang dialami dengan adanya kampung ramah anak cukup baik meskipun belum dilaksanakan dengan maksimal. Pengamatan penulis, anak yang ada di dalam Kampung Badran RW11 telah berani untuk mengemukakan keinginannya.

Perubahan juga terjadi pada permasalahan kekerasan pada anak. Menurut Joko, saat ini hampir tidak pernah mendapat laporan mengenai kekerasan anak yang terjadi di Kampung Badran RW 11. Perubahan tersebut akan menjadi acuan bagi tokoh masyarakat untuk selalu menggalakan kampanye program kampung ramah anak bersama segenap lapisan masyarakat.

“Karena saya tidak pernah puas dan tidak pernah berbicara mengenai tolak ukur, maka saya Sebisanya mungkin disetiap

kegiatan kita melibatkan anak-anak.”(Sariman, wawancara 03 November 2018 pukul 20.00 WIB).

Pernyataan senada disampaikan oleh Anastasia Partini, “Kami tetap terus menjalankan kegiatan ini agar anak mendapatkan haknya.”(Anastasia Partini, wawancara 03 November 2018 pukul 19.00 WIB). Mengenai pernyataan evaluasi kampanye kampung ramah anak, Hendro Basuki menyampaikan bahwa:

“Pokoknya kami tetap akan mengkampanyekan kampung ramah anak. Saya gak tahu sampai kapan. Yang jelas, kami fokus pemahaman orang tua demi melindungi anak dari kekerasan.”(Hendro Basuki, wawancara 12 November 15.00 WIB).

Pada kampung ramah anak, sebuah kegiatan dapat bergerak dan kampung tersebut dapat berkembang adalah tugas dari tokoh masyarakat dan lapisan masyarakat yang ada di kampung tersebut. Kesadaran dari tokoh masyarakat dalam melindungi anak di dalam kampungnya harus dilakukan dengan semangat untuk mengembangkan program kampung ramah anak di dalam kampungnya. Dalam tahap evaluasi kampanye hanya sampai pada evaluasi dari masyarakat sendiri. “Kami lakukan monitoring dengan program yang telah ada di sini”(Sariman, wawancara 03 November 2018 pukul 20.00 WIB). Hal itu senada dengan penyampaian Hendro:

“Jumlah kampung ramah anak ada 188 RW kampung ramah anak, saya kesusahan karena tidak mendapatkan laporan perkembangan dari kampung ramah anak. Kalo ada tamu kunjungan kesini mau lihat kampung ramah anak, saya juga bingung. Tetapi, DPMPPA selalu membuka diri untuk menerima laporan-laporan terkait dengan perkembangan kampung ramah anak. Kita tidak pernah diberi laporan. Dan

bukan kewajiban mereka juga memberi laporan kepada kami.”(Hendro Basuki, wawancara 12 November 2018 pukul 15.00 WIB).

Dari pernyataan tersebut, dapat diartikan bahwa evaluasi program kampung ramah anak perlu adanya kerjasama dari pemerintah dan tokoh masyarakat. Agar evaluasi yang dilakukan dapat dilihat dari berbagai pihak, dan dapat menemukan solusi yang terbaik.

Tujuan kampanye yang sesuai dengan target menurut Sutikno belum sepenuhnya tercapai. Dalam kisaran prosentase, keberhasilan kampanye yang menyentuh tujuan dan target baru sampai pada angka 65-75%.

Namun, tokoh masyarakat berinisiatif dalam mengembangkan program yang ada di kampungnya. Harapan kedepannya dari adanya program kampung ramah anak disampaikan oleh Joko Sularno:

“Pemerintah juga memberikan bantuan agar mampu mengembangkan lagi, kegiatan-kegiatan demi pemenuhan hak anak. Selain itu, harapan lain juga dituangkan oleh Joko selaku tokoh masyarakat. Selanjutnya tidak hanya sebatas kampung ramah anak, namun juga meningkatkan potensi-potensi yang berada didalam lingkungan Kampung Badran.”(Joko Sularno, 03 November 2018 pukul 16.00 WIB).

Harapan berbeda dari Hendro dalam kampanye program kampung ramah anak:

“Pengurus harus lebih inisiatif dan inovatif untuk anak-anak mereka. Kalau mereka menginginkan kami, kami siap datang.”(Hendro Basuki, wawancara 12 November 2018 pukul 15.00 WIB).

Selain dari Hendro, I Sutikno juga menambahkan harapan dengan adanya kampung ramah anak ini anak-anak memiliki kesadaran bahwa anak merupakan aset bangsa, anak merupakan aset keluarga dan karunia dari Tuhan untuk itu, anak memiliki empat hak yang harus dipenuhi sebagai mana mestinya. Dari indikator kesejahteraan, hal tersebut dapat mengalami perkembangan apabila masyarakat juga meninginkan dan memperdulikan sekitarnya.

Dari tahapan evaluasi kampanye yang telah dilakukan oleh tokoh masyarakat dapat diketahui bahwa tokoh masyarakat dan pemerintah masih terdapat komunikasi yang kurang baik karena tidak adanya *follow up* kepada program kampung ramah anak, serta tokoh masyarakat yang kurang berinisiatif dalam melaporkan kemajuan atau kendala yang dihadapi kepada pihak pemerintah. Penulis menganalisis bahwa evaluasi kampanye yang telah dilakukan belum dilakukan secara terstruktur dengan baik dibuktikan dengan program-program yang belum berkembang dengan baik.

Berdasarkan dari perencanaan dan pelaksanaan kampanye, didapatkan evaluasi dari tiap indikator kota layak anak UU Perda No.1 Tahun 2016 sebagai berikut:

- a) Hak Sipil dan Kebebasan: Adanya forum anak kampung PATRIOT namun dalam pelaksanaannya forum tersebut tidak berjalan dengan baik, lalu muncul Mudiba.

b) Lingkungan Keluarga dan Pola Pengasuhan Alternatif:
Membantu dengan pembuatan program-program dari pemerintah, pelaksanaannya juga dibantu dengan program pemerintah.

c) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Anak Berkebutuhan Khusus: Dalam perencanaan, kesehatan dasar dibantu melalui program CSR Sari Husada, dan kesejahteraan dibantu dengan dinas terkait dan pelaksanaannya juga sesuai dengan perencanaannya.

d) Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang: Pada perencanaan pendidikan dibantu dengan program CSR Sari Husada untuk pendidikan dasar dan taman belajar Bodronoyo, dan pemanfaatan waktu luang direncanakan untuk mengundang narasumber. Pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan namun terdapat tambahan program dari Mudiba yaitu jam belajar masyarakat.

e) Perlindungan Khusus: Perencanaan perlindungan khusus melalui pesan-pesan yang di berikan kepada tokoh masyarakat dan pendampingan. Pelaksanaan perlindungan khusus sesuai dengan perencanaan.

Dari pemaparan program yang sesuai dengan indikator kota layak anak, diketahui terdapat perbedaan dari perencanaan ke pelaksanaan. Perbedaan tersebut dikarenakan oleh kondisi dari

lapangan tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Evaluasi terhadap program dari perencanaan ke pelaksanaan belum seutuhnya dievaluasi dengan baik. Hal tersebut dikarenakan pola evaluasi yang belum diagendakan secara rutin dan belum menggali program-program yang awalnya ada kemudian tidak aktif kembali. “Program disini tu banyak banget mbak, jadinya kami kadang juga kewalahan.”(Sariman, 03 November 2018 pukul 20.00 WIB). Meskipun merupakan program yang dikelola secara mandiri oleh para tokoh masyarakat, namun hubungan antara pemerintah dengan tokoh masyarakat tidak ada komunikasi yang baik, karena tidak ada *follow up* pada program kampung ramah anak dari selaku pemerintah yang memberikan fasilitas, serta tokoh masyarakat tidak memberikan laporan kepada pihak pemerintah.

Menurut teori tahapan perubahan (Venus, 2004:39) tahapan evaluasi kampanye masuk dalam tahapan *maintance*(memelihara). Dalam tahapan ini menjelaskan bahwa kampanye yang telah dilakukan oleh tokoh masyarakat melakukan sebuah evaluasi. Meskipun evaluasi yang dilakukan belum secara baik.

D. Pengaitan dengan Ayat Al-Quran

Pembahasan penelitian mengenai kampanye yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dalam upaya melindungi hak-hak anak pada ada firman Allah SWT dijelaskan di Surat An-Nisa:9 yang artinya:

“....Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”

Tokoh masyarakat telah sadar akan kesejahteraan anak-anak yang menjadi penerus generasi selanjutnya, maka dari itu perlindungan terhadap hak-hak anak di tegakkan didalam Kampung Badran RW 11 dengan bentuk program.

